

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11 SEMARANG  
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat S-2

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi  
Konsentrasi : Magister Administrasi Pendidikan**



Diajukan oleh :

**THERESIA MELANIA SUDARWATI**

NIM. 140.2011.04.00109

**Kelas INTENSIF  
ANGKATAN XXXIII**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

2012

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Maret 2012

-----  
Theresia Melania Sudarwati

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11 SEMARANG  
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA**

Dipersiapkan dan disusun oleh  
THERESIA MELANIA SUDARWATI  
NIM. 140.2011.04.00109

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal : 20 Maret 2012  
Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji,

Dr. Endang Larasati, MS

Sekretaris Penguji,

Dr. Hardi Warsono, MTP

Anggota Tim Penguji Lain :

1. Dr. Ida Hayu Dwimawanti, MM

2. Yuwanto, Ph.D

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister Sain

Tanggal : Maret 2012  
Ketua Program Studi MAP  
Universitas Diponegoro  
Semarang

Dr. Endang Larasati, MS

## **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan tesis ini untuk seluruh keluagaku , semua warga Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang tercinta, terima kasih untuk segala kesabarannya berbagi waktu dan perhatian.

---

God loves you and I do too  
Theresia Melania Sudarwati

---

## **MOTTO**

“Mendidik orang hanya secara intelektual dan tanpa moral sama saja dengan menyiapkan masyarakat yang berbahaya.”(Theodore Roosevelt, Presiden Amerika Serikat tahun 1901-1909)

## RINGKASAN

Program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang adalah dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak negatif lingkungan. Program ini diharapkan dapat mengajak warga sekolah melaksanakan proses belajar mengajar materi lingkungan hidup dan turut berpartisipasi melestarikan serta menjaga lingkungan hidup di sekolah dan sekitarnya sehingga program Adiwiyata memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga dikemudian hari warga sekolah dapat turut bertanggungjawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup.

Pelaksanaan program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang tidak akan lepas dari fenomena isi kebijakan, dua diantaranya adalah derajat perubahan dan pelaksana program. Derajat perubahan untuk peduli lingkungan belum tampak seperti yang diharapkan dengan melaksanakan program tersebut. Pelaksana program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang juga belum merubah sistem manajemen di sekolah sehingga belum jelas siapa sebenarnya yang melaksanakan program tersebut kecuali bahwa yang bertanggung jawab dalam program tersebut adalah wakil urusan kurikulum. Pelaksana program baru tampak dalam kegiatan penghargaan atau lomba melalui kepanitiaan khusus. Para guru sebenarnya juga pelaksana program Adiwiyata di kelas dalam proses pembelajaran tetapi pelaksanaan program di kelas tidak pernah dimonitoring sehingga tidak diperoleh informasi tentang bukti pelaksanaan program di kelas kecuali pada mata pelajaran biologi, seni, dan bahasa Inggris.

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat implementasi program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang sangat dipengaruhi oleh kegiatan dan cara-cara yang dipakai dalam berkomunikasi diantara para pelaksana program., ketersediaan sumberdaya dan disposisi. Minimnya komunikasi dalam bentuk koordinasi tentang pelaksanaan program mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan isi kebijakan. Rendahnya sumber dana untuk melaksanakan program juga mempengaruhi kinerja para implementor. Resistensi terhadap pelaksanaan program juga tampak dari perilaku sebagian besar warga sekolah yang belum menunjukkan kepeduliannya pada lingkungan.

Sistem sekolah seharusnya menyesuaikan dengan perubahan sistem dengan pelaksanaan program Adiwiyata. Keterbukaan untuk mewujudkan sekolah yang peduli lingkungan harus terus menerus diupayakan secara berkesinambungan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi tentang isi kebijakan dan mengurangi resistensi terhadap pelaksanaan program.

## ABSTRAK

THERESIA MELANIA SUDARWATI, 2012, *Implementasi Kebijakan Lingkungan hidup Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang Menuju Sekolah Adiwiyata*

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi kebijakan lingkungan hidup Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang menuju Sekolah Adiwiyata. Disamping itu untuk menganalisa data dan informasi mengenai implementasi kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup Sekolah Menengah Atas Negeri 11 di Kota Semarang, dan memperoleh informasi baru yang dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya tentang implementasi kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di tingkat Sekolah Menengah Atas. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk mendapatkan gambaran keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak secara alami atau sebagaimana adanya. Fokus penelitian pada fenomena-fenomena atau fakta sosial yang terjadi dalam implementasi sebuah kebijakan yang meliputi derajat perubahan, pelaksana program, komunikasi, sumber daya dan disposisi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dokumen dan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sekolah peduli dan berbudaya melalui program Adiwiyata tidak berjalan sesuai dengan standar program Adiwiyata disebabkan rendahnya kegiatan komunikasi dalam bentuk koordinasi di dalam manajemen sekolah yang meliputi koordinasi antara kepala sekolah dan para penanggung jawab program, koordinasi antara penanggung jawab program dan Tim Pengembang Sekolah, dan koordinasi Tim Pengembang Sekolah dengan para pendidik atau guru. Rendahnya koordinasi mengakibatkan persepsi yang salah tentang program Adiwiyata. Sumberdaya manusia yang menguasai program Adiwiyata perlu ditingkatkan. Disposisi untuk mendukung program Adiwiyata masih rendah. Sumber dana untuk melaksanakan program tidak cukup tersedia meskipun manajemen sekolah sudah melakukan kerjasama untuk menggalang dana dari masyarakat. Dalam penelitian ini tidak diperoleh informasi baru yang dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya tentang implementasi kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di tingkat Sekolah Menengah Atas. Saran untuk memperbaiki pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk menuju sekolah Adiwiyata adalah dengan meningkatkan keterbukaan untuk mengurangi resistensi yang melibatkan partisipasi seluruh warga sekolah melalui forum-forum yang terencana secara rinci dan didokumentasikan dalam kurikulum, memberikan kesempatan para implementor meningkatkan kemampuan mereka tentang pendidikan lingkungan hidup, memberikan alokasi dana sesuai dengan tuntutan program menuju sekolah Adiwiyata.

Kata Kunci : implementasi, implementors, Adiwiyata.

## ABSTRACT

THERESIA MELANIA SUDARWATI, 2012, *The Implementation of Educational Environmental Policy in Eleven State Senior High School Semarang toward Adiwiyata School.*

The study is aimed to analyze, integrate, and describe data and information that influenced the implementation of educational environment in eleven (11) state senior high school Semarang toward Adiwiyata school. Besides, it has a goal to get new information to be developed in the future study about the same subject. The method used in the study is kualitatif description in order to describe the subject studied naturally as the way it was. The study focuses on some phenomenons or social facts happened during the implementation of publik policy such as the degree of behaviour changing, implementers, communication, resources, and disposition. The data is collected through deep observation of documents and environment, interview, and documentation. The study shows that the implementation of educational environment in eleven (11) state senior high school Semarang toward Adiwiyata school has not run well as it is stated in Adiwiyata program caused by the lack of communication in a form of coordination in school management including coordination among school headmaster and its staff, coordinator of Adiwiyata program and school developing team, school developing team and other implementers. The lack of coordination among the implementers causes the wrong perception of Adiwiyata program. There are not enough human resources that have competency to implement the program. Their attitude to support the program is still low. Eventhough school management has financial problem to support the program, the management is able to fullfil it by developing mutual understanding with society. The study has not found any new information to be developed in the future study about the same subject. Therefore, it is recommended that school management is more open to reduce resistance of the policy implementation by involving all members of the school society through carefully planned programs and the program must be written more detail in the school curriculum, to develop the implementer competence about environmental education, and to allocate more fund according to the planned program toward Adiwiyata school.

Key words : implementation, implementers, *Adiwiyata*.



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis sebagai syarat menempuh jenjang pendidikan Strata-2 di Program Studi Ilmu Administrasi, konsentrasi Administrasi Pendidikan sesuai dengan harapan. Tesis dengan judul “ Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang Menuju Sekolah Adiwiyata” ini, penulis susun atas bantuan baik moral maupun material dari banyak pihak. Maka dalam kesempatan ini dari lubuk hati yang paling dalam penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Endang Larasati, MS, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta atas kerelaan Beliau meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan dorongan agar tesis ini diselesaikan lebih cepat.
2. Bapak Dr.Hardi Warsono MTP, selaku Dosen Pembimbing II atas saran metodologi untuk perbaikan tesis ini
3. Ibu Dr. Ida Hayu Dwimawanti, MM, selaku Penguji I atas materi review yang membuat penyempurnaan tesis ini
4. Bapak Yuwanto, Ph.D, selaku penguji II untuk penyempurnaan tesis ini
5. Ibu Dra. Dyah Lituhayu atas masukan, kritik dan sarannya.
6. Ibu Dra. Margaretha S, MS, yang telah memberikan masukan untuk perbaikan tesis ini.

7. Bapak Drs. Herbasuki NC, MT, yang telah memberikan penyempurnaan untuk tesis ini.
8. Para Dosen, serta Pengelola Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Diponegoro untuk segala ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang telah diberikan.
9. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang atas kesediaannya menjadi *key informan* dalam penelitian ini dan memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Para Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 11 yang berkenan memberikan informasi dan wawasan terkait dengan implementasi kebijakan pendidikan lingkungan hidup dan program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang.
11. Teman-teman Mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan angkatan XXXIII atas kekompakan dan kebersamaan yang tidak mungkin terlupakan.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penulisan tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dan anugerah yang sesuai dengan kehendak-Nya.

Semarang, 20 Maret 2012

Theresia Melania Sudarwati

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
RINGKASAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	27
C. Tujuan Penelitian .....	29
D. Kegunaan Penelitian .....	29
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>31</b>
A. Kebijakan Publik dalam Bidang Pendidikan.....	31
B. Implementasi Kebijakan Publik .....	49
C. Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di Indonesia .....	69

D. Kerangka Berpikir .....	87
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>90</b>
A. Perspektif Pendekatan Penelitian .....	90
B. Fokus Penelitian .....	91
C. Lokasi Penelitian .....	91
D. Fenomena yang diamati .....	92
E. Jenis dan sumber data .....	96
F. Pemilihan Informan .....	97
G. Instrumen Penelitian .....	97
H. Teknik Analisis Data .....	100
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>101</b>
A. Deskripsi Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang .....	101
B. Hasil Penelitian .....	125
1. Penyajian Data dan Analisis Data .....	125
2. Analisis Data .....	184
3. Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup menuju Sekolah Adiwiyata .....	196
4. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Kebijakan .....	202
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>210</b>
A. Kesimpulan .....	210
B. Saran .....	221
GLOSSARY .....	226

DAFTAR PUSTAKA.....	229
DAFTAR LAMPIRAN .....	231

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Nilai-nilai moral Hurlock dalam Wardan, 2011: 28).....	11
Gambar 1.2 Perilaku siswa tidak peduli lingkungan .....	18
Gambar 1.3 Perilaku implemeter tidak hemat sumber daya alam.....	20
Gambar 1.4 Corat coret di sebuah ruang kelas di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang.....	21
Gambar 1.5 Posisi spanduk dan papan informasi tentang kebijakan Adiwiyata .....	23
Gambar 2.1 Program menurut Cook dan Scioli.....	37
Gambar 2.2 Implementasi kebijakan, Syafaruddin,2002.....	51
Gambar 2.3 Determinan Perilaku Administratif, Widaningrum dalam Wibawa (1994:17) .....	53
Gambar 2.4 Model Implementasi Kebijakan Menurut Meter dan Horn .....	55
Gambar 2.5 Implementasi kebijakan menurut Grindle dalam Wibawa (1994) dan Subarsono (2006).....	58
Gambar 2.6 Faktor –Faktor Penentu Implementasi Kebijakan menurut Edward III dalam Subarsono (2006) .....	60
Gambar 2.7 Materi Dalam PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP (Dikmenum.2010:HamZah,2009 dalam Murtilaksono et al,2011) .	71
Gambar 2.8 Matrik Materi Materi Pendidikan Lingkungan.....	73
Gambar 2.9 Alur Berfikir Penelitian .....	89
Gambar 4.1 Salah Satu Sudut Kebersihan Sekolah .....	111

Gambar 4.2 Perubahan Memandang Barang Limbah Dan Bekas.....	129
Gambar 4.3 Perubahan Dalam Memperlakukan Sampah .....	130
Gambar 4.4 Perubahan Perilaku Siswa Belum Tampak Untuk Menjaga Kebersihan.....	133
Gambar 4.5 Perubahan Perilaku Belum Tampak Untuk Menghemat SDA.....	135
Gambar 4.6.Sosialisasi Program Adiwiyata lewat papan pengumuman .....	150
Gambar 4.7 Komunikasi tertulis dengan Poster Ajakan Peduli Lingkungan .....	152
Gambar 4.8 Parkir Tidak Di Tempat Parkir .....	155
Gambar 4.9 Makanan Berbungkus Plastik Di Koperasi Siswa .....	156
Gambar 4.10 Suasana School of Universe Parung, Bogor .....	170
Gambar 4.11 Suasana Ruang Guru SMAN 11 Semarang .....	178
Gambar 4.12 Suasana Ruang Kelas Saat Ulangan Tengah Semester.....	179
Gambar 4.13 Pemanfaatan Gelas Plastik dan Pipa PVC bekas sebagai Media Tanam .....	181
Gambar 4.14 Pemamfaatan Limbah Dan Bekas Untuk Menciptakan Karya Seni .....	182
Gambar 4.15Menciptakan Puisi Tugas Mandiri Bahasa Inggris .....	183
Gambar 4.16 Sikap Berlawanan Dengan Kebijakan Sekolah .....	183
Gambar 4.17 Pola Komunikasi Implementasi Kebijakan.....	202

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kekayaan Biotik: Indonesia dan Dunia .....	6
Tabel 1.2 Luas Habitat dan Penyusutan .....	7
Tabel 1.3 Juara Lomba Sekolah Sehat Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Kejuruan di tingkat Kota Semarang Tahun 2011	8
Tabel 1.4 Nominasi 'Unnes <i>Green school Award</i> ' Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Jawa Tengah Tahun 2011 .....	10
Tabel 1.5 Sepuluh Besar IKIP PGRI Semarang Character Award Tahun 2011 .....	14
Tabel 1.6 Lomba Mewujudkan Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Atas Kota Semarang Tahun 2011 .....	15
Tabel 2.1 Fenomena fenomena yang mempengaruhi proses implementasi .....	68
Tabel 3.1 Pedoman Instrumen Penelitian .....	99
Tabel 4.1 Rekapitulasi Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang Tahun Pelajaran 2011/2012 .....	103
Tabel 4.2 Jumlah Mata Pelajaran Dalam Kurikulum .....	104
Tabel 4.3 Guru Tetap dalam Prosentase .....	105
Tabel 4.4 Rekapitulasi Guru Tidak Tetap Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang 2011/2012 .....	106
Tabel 4.5 Rekapitulasi Pegawai Tetap Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang 2011/2012 .....	107



Tabel 4.6 Rekapitulasi Pegawai Tidak Tetap Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang 2011/2012 .....	108
Tabel 4.7 Prasasti Lulusan Nilai tertinggi Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang .....	112
Tabel 4.8 NEM Terendah Penerimaan Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang .....	113
Tabel 4.9 Sarana Dan Prasarana Ramah Lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang 2012 .....	116
Tabel 4.10 Daftar Kegiatan Pendidikan Lingkungan Hidup Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang .....	120
Tabel 4.11 Informan Dalam Penelitian Implementasi Program Adiwiyata .....	125
Tabel 4.12 Dokumen Pembinaan/Rapat Dinas Tata Usaha Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang Tahun 2011 .....	158

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ketika mempelajari filsafat pendidikan para calon guru , guru dan para praktisi pendidikan akan selalu berhadapan dengan pertanyaan pertanyaan besar yang mendasari makna dan tujuan pendidikan. Beberapa diantara pertanyaan besar tersebut adalah mengapa masyarakat sampai hari ini mempercayai pendidikan. Pendidikan yang awalnya penting guna membela kemanusiaan mengapa berimplikasi terbalik menjadi asal muasal lahirnya ironi dan benarkah pendidikan sungguh-sungguh sesuatu yang penting sehingga dianggap harus selalu ada. Jenis pendidikan seperti apa dan mengapa model pendidikan tertentu harus dilaksanakan agar bisa selalu mengubah manusia menjadi baik. "Untuk mengubah manusia menjadi baik tentunya sangat tergantung pada bagaimana model pendidikan tersebut dilaksanakan" (Gandhi,2011:24). Model menurut Encarta dictionary adalah "*something that is used as the basic of a process or system*". Sedangkan Wikipedia mendefinisikan pendidikan sebagai "*any act or experience that has a formative effect on the...,or physical ability of an individua....Education is the process by which society deliberately transmits its accumulated knowledge, skills and values from one generation to another.*" Berbeda dengan definisi Wikipedia, Mudyaharjo (2010) menyamakan pendidikan dengan hidup. Pendidikan adalah segala situasi dalam hidup yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Pendidikan adalah sebuah proses yang melekat pada setiap kehidupan, bersama dan berjalan sepanjang perjalanan

manusia. Secara lebih lengkap John Dewey dalam Nugroho (2008:19) menggambarkan pendidikan sebagai proses pembentukan, rekapitulasi, restropeksi dan rekonstruksi seperti di kutip berikut ini

*1. Education as formation....All education forms character, mental, and moral, but formation consists in the selection and coordination of native activities so that they may utilize the subject matter of social environment. Moreover, the formation is not only a formation of a native activities, but it takes place through them. It is a process of reconstruction, reorganization....2. Education as recapitulation and restropection....The individual develops, but his proper development consists in repeating orderly stages the past evolution of animal life and human history. The former recapitulation occurs physiologically; the latter should be made to occur by means of education"....3. Education as reconstruction....It is that reconstruction or reorganization of experience which adds to the meaning of experience, and which in increases ability to the direct the course of subsequent experience.....*

Pendidikan di Indonesia digambarkan agar memberikan dampak yang konstruktif dan melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, sebagaimana dirumuskan dalam UU RI No.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS atau Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas,2010:6).

Dengan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang konsistensi penyelenggaran pendidikan pada pencerdasan kehidupan bangsa, mereka harus secara konsisten menyelenggarakan pendidikan yang memberdayakan. Pendidikan yang

memberdayakan adalah proses memanusiakan anak sehingga potensinya menjadi aktual dalam kematangan dan kemandirian hidupnya. Paling tidak dengan pendidikan yang memberdayakan, setiap anak akan mendapatkan *basic need*, dapat mengetahui hak dan tanggung jawabnya sebagai individu, anggota masyarakat dan sebagai makhluk Tuhan. Pendidikan yang memberdayakan seharusnya terus diusahakan mulai dari pendidikan usia dini, sekolah dasar, menengah, sampai dengan perguruan tinggi (Syafaruddin, 2008).

Pada penelitian ini, pendidikan dipahami sebagai usaha yang disengaja. Sengaja disini mengandung makna sebagai usaha yang direncanakan dan direkayasa untuk membangun manusia menjadi manusia yang mandiri. Mandiri disini adalah *winner* sesuai dengan pemikiran guru besar ilmu psikologi Universitas Gajah Mada, Hadipranata dan Nugroho (2008:21) yang sebangun dengan Massachusetts dan Addison-Wesley (1971:1-3) bahwa “...*a winner is one who responds authentically by being credible, trustworthy, responsive, and genuine, both as an individual and as member of society...Winner are able, and genuine, both as an individual and as member of society...Winner are able to love and be loved...*” Manusia yang mandiri untuk kemudian manunggal dengan manusia lain di manapun ia berada. Menjadi manusia mandiri yang memiliki 3 (tiga) aspek kognitif yang menurut Bloom mencakup *knowledge, comprehensions, application, analysis, synthesis, dan evaluation*. Aspek afektif yang meliputi sikap, budi pekerti, akhlak, kejujuran, keadilan, imam dan takwa. Dan aspek psikomotorik menurut Harrow meliputi *reflex movement, basic fundamental movements, perceptual abilities, physical abilities, skilled*

*movements, and non-discursive communication.* Ketiga aspek tersebut diharapkan bisa manunggal sehingga dia mampu hidup sebagai manusia yang beradab yang mampu menjadi masyarakat dan warga negara yang mengetahui hak-hak dan kewajiban - kewajibannya dan secara optimal mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara optimal (Nugroho, 2008)

Hasil dari pendidikan bisa kita rasakan bersama saat ini, fenomena industrialisasi telah merasuki sebagian besar dunia ketiga termasuk Indonesia (Syafaruddin, 2008), yang banyak memunculkan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajuan industri yang begitu cepat tidak dipungkiri telah menjamin stabilitas politik, ekonomi, transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Disisi lain kemajuan industri yang begitu cepat telah membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dampak negatif dari fenomena industrialisasi sebenarnya sudah diprediksi seperti yang dikutip oleh Brown et.al (1999:1) pada awal tahun 1992, Akademi Sains Nasional Amerika Serikat dan *The Royal Society of London* dalam sebuah laporan yang dimulai dengan:

”Jika ramalan-ramalan pertumbuhan penduduk sekarang ini terbukti tepat dan pola-pola kegiatan manusia di planet ini tetap tidak berubah, sains dan teknologi boleh jadi tidak dapat mencegah kemerosotan lingkungan hidup yang tidak dapat dipulihkan lagi atau mencegah berlangsungnya kemiskinan terus-menerus bagi sebagian besar dunia.”

Laporan dari Brown et.al dibuktikan oleh hasil kajian dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada tahun 2007 yang dikutip Kementerian Negara Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa 11 dari 12

tahun terpanas sejak 1850 terjadi dalam waktu kurun 12 tahun terakhir. Kenaikan temperatur total dari tahun 1850-1899 sampai dengan tahun 2001 – 2005 adalah  $0,76^{\circ}\text{C}$ . Permukaan air laut rata-rata global telah meningkat dengan laju rata-rata 1,8 mm per tahun dalam rentang waktu antara tahun 1961 sampai 2003. Kenaikan total permukaan air laut yang berhasil dicatat pada abad ke 20 diperkirakan 0,17 m. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* yang mengatakan bahwa kegiatan manusia ikut berperan dalam pemanasan global sejak pertengahan abad ke-20 dan pemanasan global akan terus meningkat dengan percepatan yang lebih tinggi pada abad 21 apabila tidak ada upaya penanggulangan.

Bangsa Indonesia yang sudah merdeka kurang lebih 65 tahun merupakan bangsa yang unik dengan kekayaan biotik, (tabel 1.1) yang sangat melimpah jika dibandingkan dengan jumlah biotik yang ada di dunia. Ikan dan kerang-kerangan Indonesia menguasai hampir 50% , serangga 33 % , reptil 32 % dan jamur 26 % dari kekayaan dunia. Indonesia juga menguasai kurang lebih 10% dari kekayaan dunia untuk bakteri, ganggang biru-hijau, rumput laut, lumut, pakis, tanaman bunga, burung dan mamalia, disertai dengan lokasi kepulauan yang terletak di khatulistiwa, tanah yang subur, air yang melimpah, udara yang segar, kekayaan sumber energy dan mineral yang melimpah di dalam tanah dan laut, semuanya memberikan keunikan pada bangsa Indonesia. Seharusnya dengan kekayaan yang melimpah bangsa Indonesia dapat mencapai kemakmuran lebih mudah disbanding dengan bangsa yang lain.

Tabel 1.1  
Kekayaan Biotik: Indonesia dan Dunia

Kelompok	Indonesia (jumlah spesies)	Dunia (jumlah spesies)	% spesies dunia yang ada di Indonesia
Bakteri, gangga biru-hijau	300	4.700	6
Jamur	12.000	47.000	26
Rumput laut	1.800	21.000	9
Lumut	1.500	16.000	9
Pakis	1.250	13.000	10
Tanaman Bunga	25.000	250.000	10
Serangga	250.000	750.000	33
Kerang-kerangan	20.000	50.000	40
Ikan	8.500	19.000	45
Amfibi	1.000	4.200	24
Reptil	2.000	6.300	32
Burung	1.500	9.200	16
Mamalia	500	4.170	12
Total	325.350	1.194.570	27

Catatan : Habitat terus menyusut selama sepuluh tahun terakhir.

Sumber: Bappenas dalam Erwin (2009: 156).

Pada kenyataannya Bangsa Indonesia menunjukkan kondisi yang berbeda. Kekayaan alam tereksplorasi besar-besaran, hutan rumput, hutan kayu besi, rawa lumut mengalami penyusutan selama sepuluh tahun terakhir dan hanya tersisa kurang lebih 30% lihat tabel 1.2, sementara hutan dan batu kapur, hutan di tanah ultra dasar tersisa kurang dari 40%. Sedangkan rawa air tawar, hutan pinus tropis dan hutan bakau mengalami penyusutan lebih dari 60 %. Keadaan yang lebih baik adalah hutan kayu cemara dan hutan hujan semi cemara masing-masing tersisa 57,5% dan 60%. The Jakarta Post, Sabtu 23 Juli 2011 juga melaporkan bahwa *RI needs 'more' disaster funds....the state budget's allocation of Rp 4*

*trillion for annual natural disasters in Indonesia is grossly inadequate.* Dalam kurun waktu 13 tahun (1997-2009) terjadi 6.632 kali bencana. Bencana yang paling rawan terjadi pada tahun 2008 yang mencapai 1.302 kali.

([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id))

Tabel 1.2  
Luas Habitat dan Penyusutan

Habitat	Lahan Asli (km <sup>2</sup> )	% yang tersisa
Hutan dan batu kapur	135.793	39,3
Rawa air tawan	103.054	46,8
Hutan rumput	91.660	28,6
Hutan kayu besi	3.420	34,2
Hutan kayu cemara	896.157	57,5
Dataran rendah	206.233	77,1
Hutan hijau pegunungan	219.252	78,8
Rawa lumut	150.877	28,3
Hutan hujan semi cemara	3.215	60,0
Hutan pinus tropis	50.800	43,9
Hutan bakau	8.299	46,9
Hutan di tanah ultra dasar	24.192	38,0
Hutan musim	2.170	100
Lain- lain	390	39,7
Total	1.895.512	55,8

Catatan: Habitat terus menyusut selama sepuluh tahun terakhir.

Sumber: Bappenas dalam Erwin (2009:158).

Keadaan diperparah berdasarkan data *International Disaster Database*, 2007 tercatat sepuluh kejadian bencana terbesar di Indonesia yang terjadi dalam periode waktu antara tahun 1907 dan 2007 sebagian besar merupakan bencana yang terkait dengan iklim khususnya banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan



ledakan penyakit. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 26 milyar dolar dan sekitar 70% merupakan kerugian akibat bencana yang terkait dengan iklim.

Sebagai respon terhadap perubahan iklim yang sedang dan diperkirakan akan terus terjadi, Rencana Aksi Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, 2007 terfokus pada usaha mitigasi dan adaptasi. Upaya mitigasi pada dasarnya merupakan usaha penanggulangan untuk mencegah terjadinya perubahan iklim yang semakin buruk, sedangkan adaptasi adalah upaya penyesuaian pola hidup dan sarananya terhadap perubahan iklim. Dalam perspektif sosial, perubahan iklim perlu diarahkan pada langkah kesiapan individu maupun masyarakat secara luas dalam menghadapi perubahan iklim. Pada tingkat individu, perubahan perilaku yang kondusif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan hidup harus dilakukan melalui berbagai media misalnya melalui pendidikan atau dengan *memasukkan pendidikan pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam ke dalam kurikulum pendidikan nasional*. (Kementerian Lingkungan Hidup, 2007).

Tabel 1.3  
Juara Lomba Sekolah Sehat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah  
Kejuruan di tingkat Kota Semarang  
Tahun 2011

No	Nama Sekolah	Peringkat
1	SMA Negeri 11 Semarang	1
2	SMA Negeri 8 Semarang	2
3	SMA Sedes Sapientiae Semarang	3
4	SMK N 6 Semarang	4

(Keputusan Tim Penilai di Dinas Pendidikan Kota Semarang, 29 November 2011)

UNESCO melalui ESD atau *education for sustainable development* dalam skala internasional telah meluncurkan dan melaksanakan berbagai program

Pendidikan Lingkungan Hidup untuk mempertahankan kelangsungan lingkungan hidup pada tahun 2005- 2015. Di kawasan Asia Pasifik , *Educational Sustainable Development* telah menjadi konsep pengembangan pendidikan lingkungan termasuk di Indonesia melalui program *Healthy school*, seperti yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2011 (tabel 1.3). Bentuk program yang lainnya adalah *Green schools*, Adiwiyata dan pendidikan karakter adalah untuk tingkat sekolah dasar dan menengah (Tatemono, 2011). Berbagai penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup di sebuah sekolah juga telah banyak diberikan baik oleh pemerintah Indonesia maupun lembaga swasta. Tabel 1.3, 1.4, adalah bukti-bukti pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup di Jawa Tengah dan kota Semarang dan komitmen sekolah-sekolah di Jawa Tengah pada umumnya dan di Semarang pada khususnya untuk menjawab masalah-masalah dunia dan lokal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dari tabel 1.4 tersirat informasi untuk Pendidikan Lingkungan Hidup melalui program '*Green school*' pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di kota Semarang dibandingkan dengan kota lain di Jawa Tengah untuk kategori tingkat propinsi, kota Semarang dapat belajar dari kabupaten Wonosobo, Boyolali, Rembang, Semarang dan Batang.

Tabel 1.4  
Nominasi ‘Unnes Green school Award’  
Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Jawa  
Tengah  
Tahun 2011

No	Nomor Peserta	Nama Sekolah	Wilayah
1	20306821	SMAN 1 Mojotengah	Kab Wonosobo
2	20306867	SMA N 1 Kertek	Kab Wonosobo
3	20308415	SMK N 1 Mojosongo	Kab Boyolali
4	20308466	SMK N 1 Boyolali	Kab Boyolali
5	20315654	SMA N 2 Rembang	Kab Rembang
6	20320241	SMA N 2 Ungaran	Kab Semarang
7	20320249	SMK N 1 Bawen	Kab Semarang
8	203222745	SMA N 1 Bandar	Kab Batang
9	20328879	SMA N 11 Semarang	Kota Semarang
10	20328910	SMA N 13 Semarang	Kota Semarang

Sumber : [www.unnesgreenschoolaward.id.com](http://www.unnesgreenschoolaward.id.com)

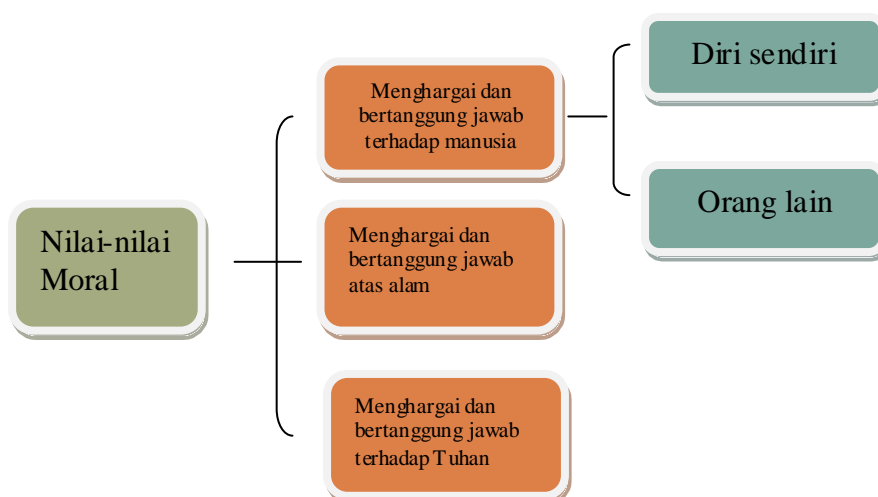
“Karakter. Ada ajaran moral dan standar moral, dan ada juga pertimbangan moral atau nilai yang menjadi komponen-komponen karakter ...Pertimbangan nilai atau moral adalah sebuah pertimbangan tentang baik atau buruk akan sesuatu berdasarkan pandangan pribadi tentang moralitas. Karakter selanjutnya berkaitan dengan tingkah laku yang diatur oleh upaya dan keinginan”.

Bukti lain dari pelaksanaan pendidikan lingkungan adalah penghargaan ‘*Character Award*’ seperti pada tabel 1.5 yang diberikan oleh lembaga pendidikan Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Pendidikan Guru Republik Indonesia (IKIP PGRI) Semarang untuk tingkat Jawa Tengah pada tahun 2011. Pendidikan karakter menurut Wardan (2011:3) dilatarbelakangi oleh “bencana yang sering/terus terulang yang dialami oleh bangsa Indonesia (dapat diduga sebagai azab atau bodohnya bangsa ini dalam memecahkan masalah lingkungan...” Pendapat Wardan bisa diterjemahkan bahwa makin rusaknya

lingkungan hidup di Indonesia lebih dari enam dekade sesudah proklamasi kemerdekaan dikarenakan bangsa Indonesia belum mencapai kemajuan dalam pendidikan karakter yang merupakan prioritas program Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014. Karakter digambarkan oleh Hurlock dalam Wardan(2011:27-28) sebagaimana gambar 1.1

Dengan demikian karakter berkaitan dengan tingkah laku yang tidak dimiliki oleh seseorang. Mereka berasal dari pengalaman dan pendidikan individu. Karakter adalah aspek tingkah laku hasil belajar, bukan tersedia secara genetik. Karakter tidak dimiliki seseorang ketika dilahirkan. Begitu juga karakter untuk mencintailingkungan hidup ada berasal dari pengalaman dan pendidikan individu. Mencintai lingkungan hidup bukanlah secara otomatis ada dari bayi melainkan merupakan aspek tingkah laku belajar seperti digambarkan pada gambar 1.1

Gambar 1.1  
Nilai-nilai moral Hurlock dalam Wardan, 2011 : 28)



Sumber: Pendidikan Karakter, Wardan (2011: 28)

Karakter moral para siswa bertumbuh secara terarah dan pasti ketika mereka secara terarah dan konsisten atau berkesinambungan dibantu untuk terus menerus berkembang melalui proses tiga tahap menurut Thomas Lickhona dalam Ohoitmur (2012) yaitu *knowing the good* atau siswa memiliki *moral knowledge*, atau pengetahuan moral. Tahap ke dua adalah *desiring the good* atau menghendaki apa yang baik dan benar, siswa memiliki *moral feeling* atau rasa moral. Kemudian tahap terakhir adalah *acting the good* atau siswa melaksanakan apa yang dimengerti dan dikehendaknya menjadi konkret.

'*Character Award*' yang diberikan oleh Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Pendidikan Guru Republik Indonesia Semarang terhadap 10 (sepuluh) sekolah di tingkat Jawa Tengah ( tabel 1.5) dan Gambar 1.1 secara tersirat menggambarkan bahwa Pendidikan Lingkungan Hidup sangat erat dengan penanaman nilai-nilai moral untuk menghargai dan bertanggung jawab atas alam. Pendapat ini didukung oleh Murtilaksono et.al (2011) yang mendefinisikan Pendidikan Lingkungan Hidup sebagai "*Efforts to change behaviors and attitudes of individuals to improve their knowledge, skills, and awareness of environmental values, issues, and problems and to motivate people to participate in efforts to preserve the environment for the present and future generation.*" Berbeda dengan Bakshi dan Naveh (1978:3) mendefinisikan "*Environmental education is, like health, peace or sex education, a field of education that has to do with strong emotions on the side of the learners as well as the teachers.*" Pendidikan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian dari pendidikan karakter secara implisit juga ditegaskan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2015 dan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional (Puskurbuk,2011). Menurut Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter yang dikeluarkan oleh Puskurbuk, 2011, satuan pendidikan sebenarnya selama ini sudah mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai pembentukan karakter melalui program operasional satuan pendidikan, hanya saja perlu diperkuat dengan nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan pada satuan pendidikan dari 19 nilai hasil kajian empirik (Pusat Kurikulum, 2009) yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, **peduli lingkungan**, peduli sosial, dan tanggung jawab. Bahkan untuk Pendidikan Lingkungan Hidup sudah dicanangkan di Indonesia dan di sekolah secara implisit mulai kurikulum 1984 melalui Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH). Yang menjadi masalah adalah dampak Pendidikan Lingkungan Hidup belum banyak dirasakan bagi lingkungan. Terbukti dari observasi sementara masih banyak ditemui siswa/lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang membuang sampah tidak sesuai tempatnya baik di sekolah atau di jalanan, merokok di luar sekolah, meludah, dan kegiatan merusak lingkungan seperti corat coret di tembok, mereka lebih menyukai bersekolah dengan menggunakan kendaraan dibandingkan dengan kendaraan yang ramah lingkungan.

Tabel 1.5  
Sepuluh Besar IKIP PGRI Semarang Character Award  
Tahun 2011

No	Nama Sekolah	Peringkat
1	SMA Negeri 3 Semarang	1
2	SMP Islam Terpadu PAPB Semarang	2
3	SMP Negeri 3 Semarang	3
4	SMP Negeri 1 Kudus	4
5	SMP Negeri 17 Surakarta	5
6	SMP Nasima Semarang	6
7	SMK Negeri 1 Karanganyar	7
8	SMP Negeri 1 Sragen	8
9	SMA Negeri 11 Semarang	9
10	SMP Negeri 2 Boyoli	10

Sumber : Keputusan Rektor Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Pendidikan Guru Republik Indonesia (IKIP PGRI) Semarang no:176/SK/IKIP PGRI/VII/2011)

Dalam penelitian ini peneliti berpijak pada kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional No.03/MenLH/02/2010, No.01/II/KB/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup melalui program Adiwiyata. Sebuah kesepakatan yang diputuskan berdasarkan beberapa pertimbangan penting yaitu: untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan memerlukan sumber daya manusia yang sadar dan mampu memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan bahwa pengetahuan, nilai, sikap, perilaku dan wawasan mengenai lingkungan hidup perlu diberikan sejak dini kepada seluruh lapisan masyarakat dan peserta didik pada semua satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Adiwiyata yaitu sebuah program yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah (guru, murid, dan pekerja lainnya), untuk mendorong upaya upaya penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang pada akhirnya dapat mewujudkan kelembagaan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan berdasarkan norma kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Tabel 1.6  
Lomba Mewujudkan Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Sekolah  
Menengah Atas Kota Semarang  
Tahun 2011

No	Pemenang	Nama Sekolah	UPTD
1	Juara 1	SMA N 11 Semarang	Semarang Selatan
2	Juara 2	SMA N 7 Semarang	Gunung Pati
3	Juara 3	SMA N 3 Semarang	Semarang Tengah

Sumber : Keputusan Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang no 660.1/2047/Sekr/XII/2011, 12 Desember 2011

Pelaksanaan kebijakan atau program menurut Abidin (2004) menyangkut kondisi riil yang sering berubah begitu juga yang terjadi di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang berdasarkan observasi sementara yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang yang secara de facto telah mendapatkan penghargaan sebagai ‘Calon Sekolah Adiwiyata’ untuk tahun 2011 (tabel 1.6) dan bisa dijadikan rintisan awal bagi Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang untuk mendapatkan pengakuan dan



penghargaan dari pemerintah pusat yang diawali dengan penghargaan sebagai Calon Sekolah Adiwiyata, Sekolah Adiwiyata, dan Sekolah Adiwiyata Mandiri di tingkat kota.

Indratno (2007) mengatakan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) pada tahun 2006 diluncurkan oleh pemerintah untuk memberikan ruang yang lebih luas pada guru, pengelola sekolah, dan murid dalam proses belajar-mengajar. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU No.20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 butir 19). Sedangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (PP No. 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 15). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang memiliki ciri desentralisasi, akomodatif, dan terbuka dapat mencerdaskan karena para guru, murid, dan pengelola sekolah diberikan kesempatan untuk jatuh dan bangun dalam menyusun dan mengembangkan sendiri kurikulum yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah mereka. Meskipun kurikulum bukanlah satu-satunya penentu mutu pendidikan dan bukan merupakan perangkat tunggal penjabaran visi pendidikan, tetapi paling tidak kurikulum memiliki fungsi dalam mutu pendidikan. Kurikulum juga dapat menjadi perangkat yang strategis untuk menyemaikan kepentingan dan membentuk konsepsi dan perilaku individu warga sekolah termasuk diantaranya perilaku untuk dapat menata dan mengelola lingkungan hidup. Kurikulum bisa dikatakan sarat dengan kepentingan kekuasaan

satuan pendidikan atau sekolah dan bisa menjadi tolok ukur untuk melihat bagaimana kepentingan sekolah tersebut dirumuskan dan dilaksanakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah.

Kurikulum berbasis lingkungan hidup menurut panduan Adiwiyata yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, 2010 adalah Kurikulum yang memiliki visi misi yang peduli dan berbudaya lingkungan sesuai dengan norma-norma dasar dan prinsip-prinsip dasar Adiwiyata. Dimana visi misi tersebut tertuang dalam dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan diuraikan dalam rencana program dan kegiatan sekolah yang terinternalisasi kepada semua warga sekolah. Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tersebut mencerminkan kebijakan sekolah tentang pengembangan materi pembelajaran PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) yang terlaksana secara terintegrasi pada mata pelajaran atau monolitik sebagai pelajaran tersendiri.

Setelah mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup program Adiwiyata, bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut, peneliti menemukan fakta-fakta nyata yang diperoleh dari observasi sementara pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang. Ketika melihat penghargaan yang diterima oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup (tabel 1.3,1.4,1.5,1.6), siapapun akan berharap bahwa perilaku mencintai lingkungan akan tergambar nyata dalam kehidupan seluruh warga Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang seperti yang disampaikan oleh

Bakshi dan Naveh (1978:20) “ *There is growing and urgent concern for emphasizing environmental education which is considered to be an important component in the attempt to solve environmental problem* “ Warga Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang menurut Bakshi dan Naveh adalah warga yang memiliki kepedulian dan memberikan penekanan Pendidikan Lingkungan Hidup sebagai komponen penting untuk menyelesaikan masalah lingkungan.

Dari observasi sementara terhadap implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang ditemukan beberapa fenomena dan fakta fakta perilaku dan sikap warga sekolah terhadap lingkungan sekolah. Beberapa bukti gambar yang diambil selama berlangsungnya Ulangan Tengah Semester pada pertengahan bulan Oktober 2011 yaitu gambar 1.2 ada sekitar 1000 sepeda motor di parkir di lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang dan keadaan ini bisa dilihat pada saat jam sekolah setiap hari mulai pukul 0.7.00 sampai dengan pukul 13.30.

Gambar 1.2

Perilaku siswa tidak peduli lingkungan



Sumber : Dokumen peneliti, 17 Oktober 2011,tempat parkir Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang.

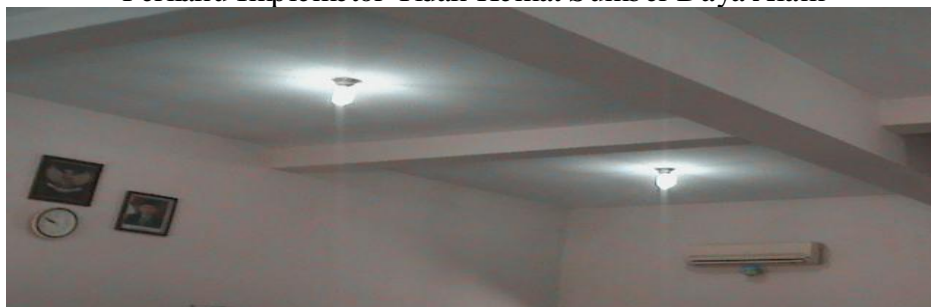
Berdasarkan bukti Gambar 1.2. tersirat perilaku yang tidak ramah lingkungan. Gambar tersebut juga bisa menyimpan informasi yang terkait dengan perubahan perilaku yang diharapkan pada target kebijakan yaitu para siswa di lingkungan sekolah yang sudah mencanangkan sebagai sekolah yang peduli lingkungan. Gambar tersebut berlawanan dengan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS atau Sistem Pendidikan Nasional bahwa para penyelenggara pendidikan seharusnya konsisten pada pencerdasan kehidupan bangsa. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup maka dugaan sementara terkait dengan kemampuan sekolah dalam mengkomunikasikan atau mensosialisasikan kebijakan program Adiwiyata, bagaimana latar belakang lahirnya kebijakan Adiwiyata, mengapa kebijakan harus dilaksanakan, bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, dan siapa yang akan melaksanakan. Bukti gambar 1.2 juga bisa diasumsikan dengan komitmen sekolah dalam mewujudkan Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang sebagai Sekolah berbudaya lingkungan. Dari observasi sementara sekolah menyediakan lahan parkir sepeda motor lebih luas dibandingkan dengan parkir untuk sepeda. Bagaimana sebenarnya komitmen para pelaksana program untuk menuju sekolah Adiwiyata atau sekolah peduli lingkungan? Apakah sikap ini muncul karena ketidakpedulian mereka akan kebijakan sekolah, kalau itu betul mengapa mereka tidak peduli, apakah karena mereka tidak mengerti mengapa sekolah melaksanakan Pendidikan Lingkungan Hidup lewat program Adiwiyata? Kalau Pendidikan Lingkungan Hidup sudah diimplementasikan dengan benar dengan adanya beberapa bukti penghargaan mengapa karakter mencintai lingkungan

belum banyak dirasakan di lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang?

Berdasarkan gambar 1.3, selain di ruang bimbingan dan konseling yang diambil peneliti pada kegiatan Ulangan Tengah Semester pada pertengahan bulan Oktober 2011 pengawas ruang maupun peserta tes tidak mematikan lampu dan kipas angin. Guru pengawas ruang maupun para siswa meninggalkan ruang dalam keadaan lampu menyala, bahkan dari observasi sementara dijumpai kejadian yang sama, hampir di semua kelas yang berjumlah 32 selama kegiatan tersebut.

Gambar 1.3

Perilaku Implementor Tidak Hemat Sumber Daya Alam



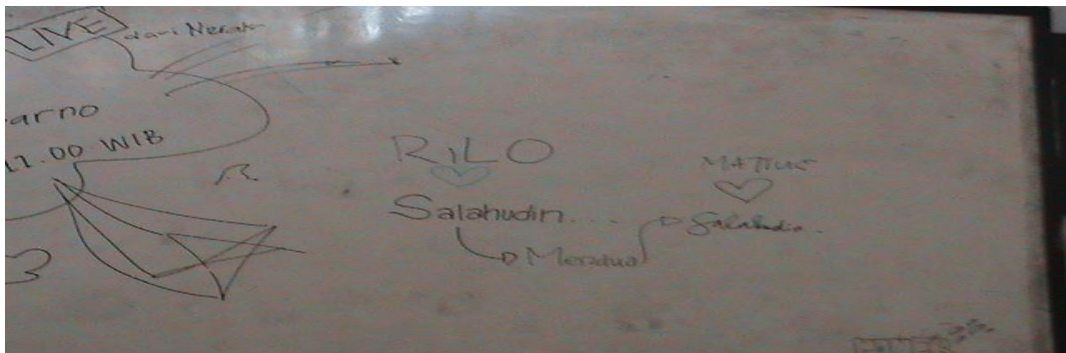
Sumber: Dokumen peneliti. Diambil pada tanggal 17 Oktober 2011, ruang BK di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang.

Berdasarkan gambar 1.3 diatas tersirat bukti yang berlawanan dengan harapan Sekjen Kemendiknas Prof. Dr. Dodi Nandika, MS dalam sambutannya di depan para penerima penghargaan Adiwiyata di Hotel Menara Peninsula 6 Juni 2011 bahwa sekolah bukan sekedar tempat transfer pengetahuan dan pengayaan nalar, tapi juga sebagai penyemaian bibit unggul di sekolah. Budaya cinta lingkungan hidup adalah dari guru-guru yang memberikan teladan, yang

merupakan penyemaian/nursery bibit perilaku baik di sekolah. BK yang artinya ruang bimbingan dan konseling tentunya bukanlah ruang yang luar biasa jika tidak berada di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang yang telah mencanangkan diri sebagai sekolah yang peduli lingkungan sehingga muncul pertanyaan dari peneliti bagaimana sebenarnya komitmen guru guru Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang dalam melaksanakan program Adiwiyata?

Gambar 1.4

Perilaku corat coret di sebuah ruang kelas di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang



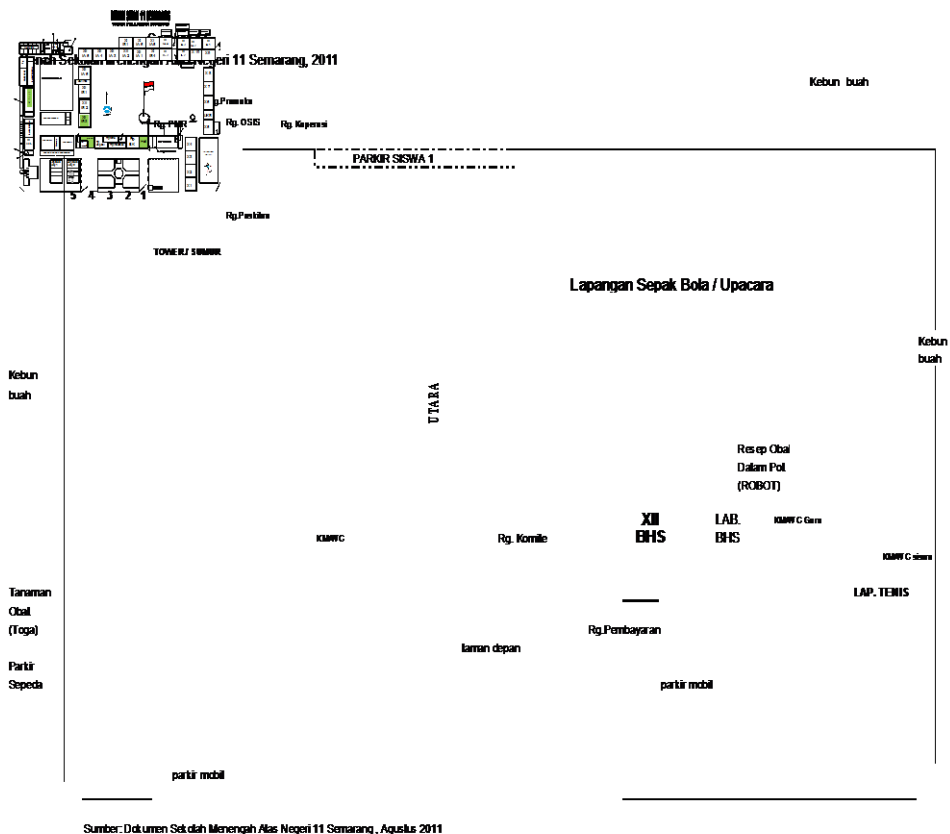
Sumber: Dokumen peneliti, 17 Oktober 2011. Ruang kelas X.2, Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang.

Bukti lain adalah gambar 1.4 seperti corat-coret meja, pintu, papan tulis. Peneliti juga memeriksa laci siswa di kelas X2 pada tanggal yang sama ditemukan bukti siswa di kelas tersebut membuang sampah di laci mereka meskipun tempat sampah tersedia di luar kelas. Fakta yang ditemukan tersebut bertolak belakang dengan spanduk berukuran 5x2 m<sup>2</sup> yang dipasang pada 'hall' atau bagian depan gedung sekolah " **Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang, Sekolah Menengah Atas Berbasis Adiwiyata.**"

Bukti sementara dari observasi dokumen dan lingkungan tentang luas tanah, Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang memiliki luas 16.560 m<sup>2</sup>, dengan luas bangunan 3.242 m<sup>2</sup> diperoleh data sementara ada dua buah spanduk dengan ukuran 5x2 meter bertuliskan "**Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang, Sekolah Menengah Atas Berbasis Adiwiyata.**" dipasang didepan *hall* dan ruang antara kelas XII IPS 3 dan ruang tata usaha (lihat warna hijau gambar 1.5). Peneliti juga menemukan 2 (dua) papan informasi berukuran 1x0,5 m<sup>2</sup> yang berisi informasi tentang kebijakan program Adiwiyata dan isu lingkungan hidup yang diletakkan di koridor didepan ruang tata usaha dan laboratorium biologi (lihat warna hijau pada gambar 1.5). Berdasarkan bukti gambar 1.5 tersirat data dan informasi sementara tentang teknik atau cara yang dipergunakan para pelaksana program Adiwiyata untuk mengkomunikasikan kebijakan program Adiwiyata ke kelompok sasaran dengan menggunakan media papan pengumuman berukuran 1x0,5<sup>2</sup>. Di lokasi Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang ditemukan ada 10 papan pengumuman, tetapi hanya satu papan pengumuman dengan ukuran 1x0,5m<sup>2</sup> yang dipergunakan untuk menginformasikan kebijakan program Adiwiyata. Dari observasi sementara ditemukan tentang cara atau teknik bagaimana mengkomunikasikan isi kebijakan kekelompok sasaran yang berjumlah 937 siswa dan berada di lingkungan sekolah seluas 16.560 m<sup>2</sup>.

Gambar 1.5

Posisi spanduk dan papan informasi tentang kebijakan Adiwiyata



Bukti observasi sementara pada dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (APBS) Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang, tahun pelajaran 2011-2012 diperoleh informasi total pendapatan sekolah Rp 6.717.781.167,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) yang berasal dari *block grand*, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota tidak langsung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota langsung, sumbangan orang tua atau wali dan pendapatan lain yang sah ditemukan informasi tentang alokasi dana untuk pelaksanaan program Adiwiyata dengan keterangan di kutip



seperti aslinya "Program: (17) Program Pendidikan Menengah. Kegiatan (17 009) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir. Uraian Kinerja: Melaksanakan kegiatan persiapan lomba Adiwiyata. Jumlah Rp 5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)." Dari observasi sementara ditemukan juga alokasi dana untuk kegiatan pembangunan sarana air bersih dan *sanitary* sejumlah Rp 35.000.000,00, dan kegiatan pemeliharaan rutin atau berkala taman yang dipergunakan untuk belanja bibit tanaman, pupuk dan tanah merah sejumlah Rp 12.702.300,00. Dari observasi sementara tentang dana yang dialokasikan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang diperoleh informasi bahwa alokasi dana untuk pelaksanaan program Adiwiyata kurang dari 1% dari total anggaran pendapatan dan belanja sekolah secara keseluruhan.

Berdasarkan sumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Semarang, Semarang memiliki luas 373,70 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 1.507.826 jiwa yang tersebar 16 kecamatan dan 1777 kelurahan, kelompok usia 15-19 berjumlah 119.783 dan 1000 diantaranya bersekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang. Sekolah Menengah Atas Negeri 11 yang telah masuk dalam kelompok 10 besar untuk Pendidikan Lingkungan Hidup lewat program *Green school*, *healthy School*, Adiwiyata dan karakter, dengan jumlah guru 75, mendapatkan tujuh(7) penghargaan dalam bidang lingkungan hidup selama 5 tahun terakhir dan secara sadar mulai tahun 2011 telah mengimplementasikan kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup melalui program Adiwiyata. Program Adiwiyata sendiri ternyata menjawab visi dan misi yang tertuang dalam Kurikulum Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang yaitu Visi:

Terwujudnya sekolah sebagai institusi *berwawasan lingkungan*, yang dapat membantu peserta didik dalam mengaktualisasikan diri, berprestasi, berbudaya, dan berbudi luhur. Dengan misi pada nomor 7, mengoptimalkan sarana prasarana yang dapat *mendukung terwujudnya sekolah yang berwawasan wiyata mandala* dan nomor 8, mengembangkan sekolah menjadi tempat *pembelajaran, penyadaran penyelamatan, dan pelestarian lingkungan hidup*. Hal ini bisa diintepertasikan bahwa 1000 anak yang bersekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang memiliki peluang yang sama untuk menjadi manusia Indonesia yang peduli lingkungan dengan syarat implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang berada di tangan pelaksana yang juga peduli terhadap lingkungan.

Dari data penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widiyanto Kukuh seorang mahasiswa jurusan geografi ilmu sosial Universitas Negeri Semarang tentang partisipasi siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang pada tahun pelajaran 2010-2011 dalam pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup melalui program sekolah hijau atau *Green schools* diperoleh gambaran bahwa dari 100 responden ternyata 91 responden (91%) memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam tahap sosialisasi program sekolah hijau atau *green school* dan 9 (9%) responden memiliki tingkat partisipasi yang sangat tinggi. Sedangkan pada tahap pelaksanaan program sebanyak 83 (83%) responden memiliki tingkat partisipasi tinggi dan sebanyak 17 (17%) responden memiliki partisipasi sangat tinggi. Tingkat partisipasi siswa dalam tahap evaluasi dari 100 responden 86 (86%) responden memiliki tingkat partisipasi tinggi, 12 (12%) responden memiliki

tingkat partisipasi sangat tinggi dan hanya 2 (2%) responden yang memiliki tingkat partisipasi yang rendah. Secara keseluruhan dapat digambarkan bahwa pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup melalui program sekolah hijau atau *Green schools* mendapatkan dukungan yang tinggi yaitu 100%. *Dalam penelitian tersebut juga diperoleh gambaran bahwa kebijakan sekolah dalam peningkatan sumberdaya manusia (SDM) di bidang lingkungan hidup mengalami kesulitan dikarenakan oleh adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Green school, baik guru maupun siswa.*

Di luar penghargaan yang diterima oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang dalam menuju Sekolah Adiwiyata, terdapat fakta, peristiwa, kenyataan empiris maupun data serta hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan yang menunjukkan faktor –faktor yang tidak berjalan dengan benar dalam implemetasi program Adiwiyata sehingga muncul pertanyaan bagaimana sebenarnya implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang. Penelitian ini harus dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam dan mendekati kenyataan tentang implementasi program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang. Jika faktor faktor yang merintangai pelaksanaan program ini ditemukan, maka para pelaksana program segera dapat berkoordinasi untuk menemukan alat-alat khusus, cara-cara yang menyangkut kreativitas dalam tahapan pelaksanaan berikutnya yaitu menuju Sekolah Adiwiyata. Keuntungan lain dari penelitian adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang merupakan tahun pertama melaksanakan program Adiwiyata sementara untuk

masuk pada katagori sekolah Adiwiyata Mandiri hasil dari penelitian ini akan sangat diperlukan sehingga faktor faktor yang mengganggu selama tahun pertama pelaksanaan program dapat ditemukan. Kerugian kerugian yang bisa dialami apabila penelitian tentang implementasi ini tidak dilakukan, Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang tidak mengetahui bahwa ada faktor-faktor yang tidak berjalan dan implementasi program pada tahun-tahun berikutnya akan terus terganggu. Apalagi penghargaan bukanlah tujuan dari program Adiwiyata. Tujuan utama dari program Adiwiyata tidak akan terlepas dari definisi pendidikan dan Pendidikan Lingkungan Hidup sendiri. Jadi menurut peneliti, penelitian tentang implementasi program Adiwiyata adalah penting karena berkaitan dengan penanaman nilai mencintai lingkungan yang akan berlangsung terus menerus dan tidak berhenti hanya karena penghargaan.

Dalam kesempatan ini penulis mengajukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang Menuju Sekolah Adiwiyata.”**

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian dengan judul **Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang Menuju Sekolah Adiwiyata** dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Derajat perubahan yang diharapkan untuk peduli lingkungan dengan melaksanakan pendidikan lingkungan hidup melalui program Adiwiyata masih rendah.
- b. Pelaksana program belum dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan kegiatan program.
- c. Sosialisasi isi kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup melalui program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang dari pelaksana kebijakan ke kelompok sasaran tidak terkomunikasikan dengan baik.
- d. Komunikasi yang rendah dari para pelaksana program dalam usaha meningkatkan kompetensi mereka dalam pelaksanaan program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang.
- e. Kurangnya jumlah implementor yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan Pendidikan Lingkungan Hidup melalui program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang.
- f. Komitmen sekolah yang rendah untuk menyediakan dana dalam pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup lewat program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang.

## **2. Perumusan Masalah**

Dalam penelitian dengan judul **Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang Menuju Sekolah Adiwiyata** berdasarkan identifikasi masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

*"Bagaimana implementasi kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang menuju Sekolah Adiwiyata."*

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara nyata mengenai implementasi kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup Sekolah Menengah Atas Negeri 11 di Kota Semarang menuju Sekolah Adiwiyata

Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis

1. Data dan informasi mengenai implementasi kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup Sekolah Menengah Atas Negeri 11 di Kota Semarang.
2. Informasi baru yang dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya tentang implementasi kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di tingkat Sekolah Menengah Atas

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan mendapatkan gambaran yang nyata tentang implementasi kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang sebagai informasi serta penjelasan kepada pelaksana kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup.

Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Untuk Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang, sebagai gambar atau potret dalam mengimplementasikan kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk menuju sekolah Adiwiyata.
2. Untuk para peneliti, diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai salah satu bentuk implementasi kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup menuju sekolah Adiwiyata.
3. Untuk para pengambil kebijakan, diharapkan dapat memahami permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan yang dialami berkenaan dengan implementasi kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk menuju sekolah Adiwiyata.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam penelitian dengan judul *Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang Menuju Sekolah Adiwiyata* akan dikaji beberapa teori maupun hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian yang meliputi (1) Kebijakan Publik dalam Bidang Pendidikan, (2) Implementasi Kebijakan Publik dan (3) Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di Indonesia.

#### **A. Kebijakan Publik dalam Bidang Pendidikan**

##### **1. Pengertian Kebijakan Publik**

Kajian teori tentang kebijakan publik dalam bidang pendidikan akan diawali dengan kajian pengertian kebijakan publik karena kajian teori tersebut sesuai dengan penelitian yang berkaitan dengan salah satu kebijakan publik tentang program Adiwiyata. Program Adiwiyata seperti yang diuraikan pada bagian latar belakang penelitian merupakan amanah Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 02 tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata dan disempurnakan menjadi kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional No.03/MenLH/02/2010, No.01/II/KB/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup melalui program Adiwiyata.



Untuk memahami kebijakan publik pengetahuan tentang makna dan asal usul kata kebijakan dan publik menurut penulis haruslah dipahami terlebih dahulu. Kebijakan menurut Islamy dalam Suwitri(2011) meskipun merupakan kata sudah sangat dikenal dalam kehidupan sehari-hari, ternyata kata kebijakan memiliki konotasi yang berbeda dengan kebijaksanaan. Kedua kata yang sering dicampur adukkan ternyata memiliki makna yang sangat berbeda. Kebijaksanaan berasal dari kata *wisdom*, sedangkan kebijakan berasal dari kata *policy*. Keduanya membutuhkan syarat-syarat yang berbeda dalam pelaksanaannya. Kebijaksanaan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh, sementara kebijakan dalam pelaksanaannya mencakup peraturan-peraturan di dalamnya dan sangat berkaitan dengan proses politik. Pendapat Islamy tersebut berbeda dengan Abidin(2004) yang tidak membedakan makna antara kata kebijakan dan kebijaksanaan selama kedua istilah itu diartikan sebagai keputusan pemerintah yang relatif bersifat umum dan ditujukan untuk masyarakat umum.

Ada beberapa definisi kebijakan dari beberapa penulis besar tentang ilmu kebijakan seperti Harold D Laswell, Abraham Kaplan, Carl J. Fredrik, James E. Anderson dan Suwitri yang intinya mereka setuju bahwa kebijakan berkaitan dengan suatu program atau serangkaian tindakan, taktik, dan strategi untuk mencapai tujuan (Irfan Islamy dalam Suwitri ,2011). Meskipun begitu Fredrik dan Suwitri menekankan bahwa serangkaian tindakan tersebut harus didasarkan pada usulan dari seseorang, kelompok atau pemerintah.

Berbeda dengan Abidin (2004) yang mengartikan *publik* dalam bahasa Indonesia pemerintah, masyarakat atau umum, Suwitri (2011) mengartikan

publik yang berasal dari *publik* sebagai beranekaragam menurut bahasa Indonesia sangat tergantung pada kata yang menyertainya dan bisa diartikan umum, rakyat, masyarakat, publik, Negara atau pemerintah. Suwitri memberikan contoh *publik opinion* diterjemahkan dengan pendapat umum, *publik library* diterjemahkan perpustakaan rakyat, *publik health* diterjemahkan kesehatan masyarakat. Publik bisa juga diartikan Negara dalam kata publik administration dan publik dalam kata publik policy.

Ketika berbicara tentang kajian dan praktik kebijakan publik, Wibowo.et.al (2002) menguraikan bahwa ada tiga cakupan yang menonjol yang berkaitan dengan kajian dan praktik kebijakan publik. *Pertama* posisi kebijakan publik yang strategis dalam penentuan arah umum yang harus ditempuh untuk mengelola isu-isu yang ada di masyarakat, *kedua* menentukan ruang lingkup masalah yang dihadapi pemerintah, dan *ketiga* kemampuannya untuk mengetahui atau memetakan ukuran besarnya organisasi publik. Ketiga poin tersebut membuka wawasan kita bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang riil dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah, antara individu dan Negara. Kebijakan publik adalah sebuah respon atas apa yang sedang terjadi di masyarakat juga mencerminkan tentang apa-apa yang diinginkan untuk terjadi dan berubah dalam sebuah masyarakat.

Sementara Thomas Dye dalam Subarsono (2005:2) mendefinisikan kebijakan publik atau kebijakan Negara sebagai "*whatever governments choose to do or not to do*" (Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan). Amara Raksasataya dalam Islamy juga mengemukakan bahwa

kebijakan publik sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Berbeda dengan James E. Anderson dalam Subarsono(2006:2) kebijakan publik adalah sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industry, pertahanan, dan sebagainya, meskipun ada para aktor dan faktor dari luar pemerintah.

Dalam dimensi subjek Abidin (2004) kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat dianggap kebijakan yang resmi sehingga kebijakan tersebut mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk patuh dan melaksanakan kebijakan tersebut. Wibawa(1994) memandang pemerintah sebagai suatu organisasi yang dibentuk sebagai hasil musyawarah atau konsensus dari semua pelaku politik baik pelaku individu maupun kelompok dan organisasi.

Hampir di semua Negara pemerintah bersifat bertingkat. Di Indonesia terdapat lima tingkatan pemerintah yaitu:

- (1) Pemerintah pusat
- (2) Pemerintah propinsi/daerah tingkat I
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kotamadya daerah tingkat II atau kota  
administrative
- (4) Kecamatan
- (5) Desa/kelurahan

Tugas pemerintah adalah menyerap semua tuntutan dan kepentingan para pelaku politik, menghimpun sumber daya dari para pelaku ini, dan

memenuhi tuntutan serta kepentingan tersebut. Yang menjadi masalah adalah tidak semua tuntutan dapat dipenuhi dalam waktu yang bersamaan disebabkan oleh karena jumlah dan kualitas sumber daya yang lebih sedikit dibanding tuntutan itu. Itulah mengapa pemerintah selalu melakukan penyaringan dan pemilihan tuntutan atau kepentingan. Hasil penyaringan dan pemilihan inilah yang terumuskan sebagai kebijakan publik.

Wibowo (1994) berpendapat bahwa suatu kebijakan publik mengandung aspek politik yang sangat kuat, karena untuk melahirkan sebuah kebijakan publik pemerintah harus melakukan penyaringan dan pemilihan kepentingan yang mengakibatkan para pelaku saling berebut mempengaruhi sikap pemerintah. Persoalan politik yang melekat dalam suatu kebijakan misalnya mengapa pemerintah membuat kebijakan tersebut? Sumber daya apa dan yang dimiliki oleh siapa yang harus digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakannya? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan?.

Ketika sebuah kebijakan mengakomodasi tuntutan atau kebutuhan sekelompok aktor atau pelaku, maka di sisi lain kebijakan tersebut mengorbankan kebutuhan sekelompok aktor yang lain untuk tidak dipenuhi bahkan kelompok ini kadang menjadi korban dalam arti yang sesungguhnya, karena mereka mengeluarkan sumber daya bagi pelaksanaan kebijakan tetapi tidak memperoleh manfaat apapun darinya.

Dengan demikian kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu menyentuh tiga aspek (Wibowo, 1994):

- (1) Mengerahkan sumber daya

- (2) Mengatur perilaku para aktor
- (3) Mengubah tata nilai para individu atau aktor kebijakan melalui berbagai macam cara.

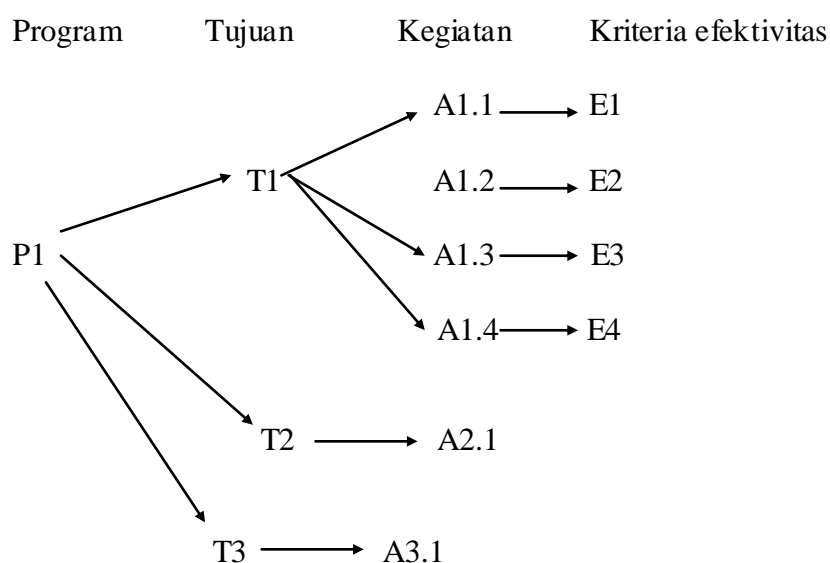
Subarsono (2006) menegaskan bahwa lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, dan sebagainya. Disamping itu menurut Subarsono dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Propinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/kota, dan keputusan Bupati/Walikota. Wibowo (1994) mengungkapkan beberapa istilah penting yang berkaitan dengan cara untuk mencapai tujuan kebijakan publik. Dua diantaranya adalah kebijakan regulasi dan kebijakan alokatif. Kebijakan regulasi adalah kebijakan yang mengatur masyarakat misalnya perundangan undangan tentang pendidikan. Sedangkan kebijakan yang mengatur pembagian sumber daya adalah kebijakan alokatif misalnya perundang undangan tentang anggaran dan perpajakan.

Dunn dalam Wibowo (1994) mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan kebijakan, pemerintah melakukan aksi dan tindakan yang berupa

- (1) Penghimpunan sumber daya yang disebut input kebijakan
- (2) Pengelolaan sumber daya yang disebut proses/implementasi kebijakan, dimana dalam tahapan ini terdapat perilaku administratif ,organisasional, dan politis

Selanjutnya di dalam proses implementasi, birokrasi pemerintah menginterpretasikan kebijakan menjadi program, jadi program dapat dipandang sebagai ‘kebijakan birokrasi’, karena dirumuskan oleh birokrasi yang otomatis membawa kepentingan para birokrat. Selanjutnya kebijakan birokrat ini menjadi kebijakan politis yang lebih operasional dan siap dilaksanakan. Untuk membuat kebijakan politis lebih operasional lagi agar para pelaksana dilapangan bisa bertindak program dirumuskan sebagai proyek. Sementara Cook dan Scioli dalam Wibowo (1994) setiap program yang diturunkan dari sebuah kebijakan mempunyai beberapa tujuan, dan setiap tujuan dapat dicapai dengan beberapa kegiatan (gambar 2.1). Program menurut Arikunto (2009) jika dikaitkan dengan implementasi dari sebuah kebijakan adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Gambar 2.1  
Program menurut Cook dan Scioli



Sumber: Program menurut Cook dan scioli dalam Wibawa(1994:6)

Dari kajian teori tentang kebijakan publik tentang pernyataan beberapa penulis besar tentang ilmu kebijakan seperti Harold D Laswell, Abraham Kaplan, Carl J.Fredrik, James E. Anderson dan Suwitri dapat dijelaskan bahwa kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional No.03/MenLH/02/2010, No.01/II/KB/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup adalah sebuah kebijakan publik dalam bidang pendidikan yang berkaitan dengan suatu program atau serangkaian tindakan, taktik, dan strategi untuk mencapai sebuah tujuan yaitu untuk menanamkan nilai peduli lingkungan didasarkan pada usulan dari seseorang, kelompok atau pemerintah yang peduli lingkungan.

Dari kajian teori menurut Cook dan scioli program Adiwiyata hanya akan menjadi dokumen mati apabila tidak diturunkan menjadi kegiatan atau tindakan dalam proses implementasinya. Program Adiwiyata adalah kebijakan birokrasi yang diturunkan dari sebuah kebijakan pemerintah pusat yang merupakan tanggung jawab dari Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional sebagai tindakan pemerintah pusat untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Kebijakan publik tentang Pendidikan Lingkungan Hidup tersebut sebagai jawaban dari tuntutan masyarakat dunia dan nasional akan pentingnya pengetahuan, nilai, sikap, perilaku dan wawasan mengenai lingkungan hidup yang perlu diberikan sejak dini kepada seluruh lapisan masyarakat dan peserta didik pada semua satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Menurut peneliti kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional No.03/MenLH/02/2010, No.01/II/KB/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup merupakan kebijakan publik yang strategis untuk mendukung pengembangan pelaksanaan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau *Educational for Sustainable Development*(EDS) yang dicanangkan oleh UNESCO.

## **2. Kebijakan Publik dalam bidang Pendidikan**

Dalam kajian teori tentang pengertian kebijakan publik Subarsono(2006:2) berpendapat bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya, meskipun ada para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Menurut peneliti pendapat Subarsono mengandung pengertian bahwa sebenarnya ada beberapa jenis kebijakan publik dan salah satunya adalah kebijakan publik dalam pendidikan.

Ketika mengkaji kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional No.03/MenLH/02/2010, No.01/II/KB/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup melalui program Adiwiyata bisa diartikan bahwa badan-badan dan aparat pemerintah dalam bidang tertentu bisa melakukan kesepakatan bersama untuk menetapkan sebuah kebijakan publik.



Kajian kebijakan publik dalam pendidikan menurut Syafaruddin (2008) tidak dapat dilepaskan dari persoalan yang kini dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan menurut Syafaruddin akan meningkat apabila negara mampu melahirkan kebijakan pendidikan yang akurat, kebijakan pendidikan yang berkelanjutan. Kualitas pendidikan umumnya dikaitkan dengan tinggi rendahnya prestasi yang ditunjukkan dengan kemampuan siswa mencapai skor dalam tes, kemampuan lulusan mendapatkan dan melaksanakan pekerjaan dengan memiliki kualitas perilaku 'ramah lingkungan'. Kualitas pendidikan ini dianggap penting karena sangat menentukan gerak laju pembangunan di negara manapun juga. Oleh karenanya, hampir semua negara di dunia menghadapi tantangan untuk melaksanakan pembaharuan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut beberapa pakar pendidikan seperti Michael Rutz 'Karena setiap pribadi selalu mempunyai defisit maka pendidikan adalah suatu proses kompensatoris yang dapat membantu anak didik untuk sedapat-dapatnya menutupi defisit tersebut.', dan untuk melengkapi kekurangan anak didik menurut P.J.Hills yang diringkas oleh Nugroho (2008) '*...education is a process of learning aimed at equipping people with knowledge and skills. There are to be enough to equip people sufficiently well so as to enable them to live satisfactory, continue to learn and pursue career...*'

Tilaar dan Nugroho (2009) menguraikan bahwa pendidikan bukan lagi menjadi urusan masyarakat tradisional, melainkan dalam masyarakat yang modern pendidikan telah menjadi komoditas penting dalam panggung politik,

bahkan untuk menjadi pemenang politik mereka sering mengusung isu penting pendidikan untuk kepentingan partai mereka. Menurut Thomas Friedman dalam Tilaar dan Nugroho (2009) sejarah perkembangan pendidikan dewasa ini berada dalam dunia yang rata. Dunia yang rata menurut Thomas Friedman adalah akibat globalisasi yang muncul dengan sendirinya dan ada tiga tingkatan proses globalisasi yaitu G1.0, G 2.0, dan G 3.0.

G 1.0 adalah proses globalisasi yang ditandai dengan penemuan dunia baru yang sebelumnya belum dikenal seperti penemuan benua Amerika oleh Columbus. Terlepas oleh dorongan ekspansi dari kebudayaan barat atau motif penjelajahan yang akhirnya melahirkan kolonialisme dan imperialism yang telah menyengsarakan sebagian besar umat manusia semuanya tidak lain berakar dari kemampuan akal dan teknologi manusia sebagai hasil dari kemajuan pendidikan bangsa barat.

Era G2.0 menurut Thomas Friedman juga telah membawa kesengsaraan manusia terutama di belahan dunia Timur sebagai akibat dari kemajuan akal manusia serta dimulainya pengembangan ilmu pengetahuan yang menghasilkan era industrialisasi khususnya di Negara barat. Pada era ini kewajiban belajar terutama di negara-negara maju mulai dilaksanakan karena adanya kesadaran bahwa melalui proses pendidikanlah proses industrialisasi dapat diwujudkan bahkan dipercepat. Thomas Friedman mengatakan pendidikan modern khususnya pendidikan rakyat telah lahir di era industrialisasi.

Di era G 3.0 Thomas Friedman mengatakan bahwa dunia telah menjadi *flatword* atau rata sebagai akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi khususnya

teknologi komunikasi dan transportasi. Di era ini buah dari kemajuan ilmu pengetahuan telah berhasil menaklukkan ruang angkasa yang tidak bisa dipungkiri merupakan buah proses pendidikan. *Flatworld* bukan hanya merupakan tantangan bagi manusia dalam persaingan bisnis tetapi juga kerja sama untuk membangun dunia yang lebih makmur dan lebih baik untuk semua manusia. Semua hal tersebut dapat dicapai melalui proses pendidikan yang sesuai.

G 1.0, G 2.0, G 3.0 telah membuktikan bahwa pendidikan menjadi motor perubahan global yang radikal. Tidak mengherankan pendidikan dijadikan program utama bagi partai-partai politik untuk membujuk rakyat bahkan pendidikan juga dipergunakan untuk melestarikan jabatan atau kekuasaan. Bisa dikatakan bahwa pendidikan telah bergeser dari domain personal ke domain publik dan di banyak Negara termasuk Indonesia, pendidikan telah dijadikan kebijakan utama untuk kemajuan suatu bangsa. Kesuksesan pendidikan modern di era industrialisasi menurut Syafaruddin (2008) karena didukung oleh kebijakan pendidikan yang mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat.

Pada abad XIX Negara Amerika mengirimkan ribuan mahasiswa untuk belajar ke Jerman, Negara yang terkenal dengan kemajuan industrinya, untuk dapat mengalihkan kemajuan industry dan intelektualisme Jerman ke Amerika. Mereka melakukan penelitian-penelitian untuk memajukan ilmu pengetahuan mereka. Selain itu Amerika juga mengirimkan mahasiswa mereka untuk belajar pertanian dan pengembangan industry di Eropa.

Pada abad yang sama kebijakan untuk mengirim ribuan mahasiswa untuk belajar di Negara Amerika dan Eropa juga dilakukan oleh Negara Jepang, tepatnya pada pertengahan abad XIX pada zaman restorasi Meiji. Hasil dari pengiriman ribuan mahasiswa untuk belajar di Eropa dan Amerika adalah pada permulaan abad XX angkatan laut Jepang dapat mengalahkan angkatan laut Rusia. Kemajuan teknologi dan industri perang Jepang telah dikembangkan dalam menghadapi Negara-negara sekutu dalam Perang Dunia II yang dipimpin oleh salah seorang laksamana bernama Yamamoto yang pernah menjadi mahasiswa Harvard yang mempelajari ilmu perminyakan pada 1930an.

Dari contoh kemajuan yang dicapai oleh Negara Amerika dan Jepang tampak dengan jelas peranan pendidikan dalam perkembangan kemajuan Negara. Bahkan menurut Tiaar dan Nugroho (2009) kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari upaya untuk mengembangkan prinsip hidup berdemokrasi seperti yang dilaksanakan oleh Negara India. Menurut pemenang Nobel ekonomi tahun 1999 Amartya Sen menunjuk dengan jelas kaitan antara tingkat pendidikan suatu bangsa dengan tingkat kemiskinan dan kehidupan demokratis.

Pendidikan juga telah menjadi tugas bersama didalam masyarakat sehingga muncul lembaga-lembaga pendidikan yang bernama sekolah atau pusat-pusat pelatihan yang proses pendidikannya dapat berjalan secara formal. Untuk mencapai tujuan pendidikan didalam melaksanakan pendidikan tersebut diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan oleh *stakeholder* lembaga pendidikan itu dapat tercapai. Pengaturan-pengaturan tertentu tersebut dikenal dengan kebijakan pendidikan. (Tiaar dan

Nugroho ,2009). Selanjutnya mereka juga menjelaskan pentingnya kebijakan pendidikan karena kebijakan pendidikan selalu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan besar yang menyangkut pengaturan kehidupan dengan sesama manusia seperti apakah manusia itu atau apakah hakikat manusia itu. Selanjutnya jawaban terhadap hakikat manusia akan membawa kita ke pertanyaan apakah sebenarnya tujuan hidup manusia di dunia ini dan bagaimana manusia itu dapat mewujudkan tujuan tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah sebenarnya proses pendidikan itu? Pengertian yang tepat mengenai hakikat proses pendidikan itu akan melahirkan berbagai kebijakan pendidikan. Kekosongan pengertian mengenai proses pendidikan akan menghasilkan kekeliruan-kekeliruan yang fatal berkaitan dengan perkembangan kehidupan manusia sendiri.

Proses pendidikan sendiri terkait erat dengan kekuasaan. Seperti sekeping uang logam pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan. Tidak seluruh kekuasaan itu memiliki sifat yang negatif, bahkan Tiaar dan Nugroho mengatakan tanpa kekuasaan tidak mungkin ada proses pendidikan. Namun mereka berdua juga menggarisbawahi bahwa kekuasaan yang terus-menerus tanpa batas merupakan suatu pemberangusan terhadap hakikat manusia sebagai makhluk merdeka, sehingga manusia itu menjadi tidak berdaya karena telah dirampas hak-hak asasinya sebagai manusia.

Berdasarkan bukti-bukti empiris tentang keberhasilan pendidikan yang telah diuraikan berkaitan dengan kebijakan publik dalam bidang pendidikan, menurut penulis, kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional

No.03/MenLH/02/2010, No.01/II/KB/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup melalui program Adiwiyata akan melahirkan perubahan yang radikal tentang pembangunan yang berkelanjutan dan melahirkan manusia manusia yang peduli lingkungan apapun profesinya. Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup menurut penulis juga merupakan sebuah bukti sisi positif dari proses politik dalam kebijakan dunia pendidikan. Dari kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup penulis bisa melihat bagaimana hubungan masyarakat dan pemerintah dimana pemerintah memang memiliki kekuatan dan kemampuan secara paksa melalui program Adiwiyata menanamkan nilai-nilai peduli lingkungan melalui jalur pendidikan.

#### **a. Kebijakan Pendidikan Di Sekolah**

Kajian teori tentang kebijakan pendidikan di sekolah menurut penulis akan memperjelas masalah masalah yang akan diteliti karena berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang kriteria sekolah Adiwiyata untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata tidak bisa dilepaskan dari tuntutan pengembangan kebijakan sekolah yang berkaitan dengan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, kebijakan sekolah untuk pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, pengembangan kegiatan berbasis partisipatif dan kebijakan sekolah untuk pengembangan atau pengelolaan sarana pendukung sekolah berwawasan lingkungan.

Berbicara tentang kebijakan pendidikan di sekolah tidak akan bisa dilepaskan dari pengetahuan sekolah sebagai sebuah sistem atau lebih dikenal

dengan sistem sekolah. Menurut Syafaruddin (2008) sistem persekolahan adalah lembaga yang menyelenggarakan kebijakan pendidikan nasional. Karena sekolah bertugas dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan nasional maka sistem sekolah sebenarnya adalah sub sistem dari sistem pendidikan nasional. Sebagai lembaga yang menyelenggarakan kebijakan pendidikan nasional, sekolah mengintegrasikan semua sub sistem misalnya tujuan sekolah, nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, menjalankan tugas sekolah seperti pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan tuntutan keperluan masyarakat. Semua sub sistem tersebut atau dikenal dengan sub sistem sosial memerlukan pendidikan, psikologi, komunikasi dan bahasa. Sistem sekolah biasanya dijalankan oleh kepala sekolah, guru, pegawai, pengawas, dan murid yang memiliki peran sebagai motivator, memiliki kewenangan dan kemampuan berkomunikasi serta berusaha menjadi teladan dalam kegiatan berinteraksi. Komunikasi dalam sistem sekolah mengikuti pola komunikasi yang unik. Pola komunikasi mengikuti struktur dan merupakan komunikasi antar manusia dimana kepala sekolah berperan sebagai pimpinan, manager, pendidik, pengawas, dan pendorong bagi guru-guru dalam proses pelaksanaan tugas. Guru yang merupakan bagian dari sub sistem berinteraksi dengan sesama guru dan murid dalam proses pelaksanaan tugas, sedang sekolah berinteraksi dengan anak didik atau pelajar untuk mengembangkan potensi anak didik atau pelajar. Komunikasi dengan pola yang unik tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan sekolah. Dari kegiatan interaksi untuk mencapai tujuan sekolah bisa dikatakan bahwa sekolah menfungsikan manajemen dari mulai perencanaan, pengorganisasian, maupun pengawasan. Tujuan sekolah bisa dicapai apabila ada

unsur unsur lain seperti sarana dan prasarana, fasilitas dan finansial sekolah, kurikulum, layanan bimbingan dan pembinaan murid untuk mendukung kegiatan komunikasi mereka. Untuk mencapai sasaran, ahli sosiologi dan pendidikan menekankan pada bagaimana sekolah memimpin dan mengelola, bagaimana murid dikelompokkan, keterlibatan orang tua dan masyarakat, cara pelajar dan guru bekerja sama dan cara keputusan di buat sekolah (Owens dalam Syafaruddin,2008).

Dari uraian tentang sekolah sebagai sub sistem bisa disimpulkan bahwa sekolah adalah suatu organisasi formal yang memiliki peran yang strategis dan sangat menentukan kualitas generasi di masa depan. Begitu strategisnya sehingga tujuan sebuah sekolah harus secara rinci dirumuskan baik dalam tatar sekolah maupun pada tatar mata pelajaran. Perumusan tujuan sekolah tidak dapat dipisahkan dari rumusan visi dan misi sekolah yang biasanya akan dirumuskan terlebih dahulu dengan mengakses kebutuhan mendasar akan pendidikan yang dapat disediakan oleh sekolah (Sagala,2010). Visi menurut Gaffar dalam Sagala(2008:134) adalah " daya pandang yang jauh mendalam dan meluas yang merupakan daya piker abstrak, memiliki kekuatan yang dasyat dan dapat menerobos segala batas fisik, waktu, dan tempat." Sementara misi menurut Sagala (2008:135) "sebagai deskripsi tentang apa yang hendak dicapai dan untuk siapa." Sebagai lembaga sub sistem dari pendidikan nasional maka visi dan misi sekolah adalah aspirasi seluruh komponen sekolah mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat sekolah yang menjadi elemen dasar penyelenggaraan program sekolah.



Dalam konteks kebijakan pendidikan pengembangan sekolah Morphet, et.al dalam Syafaruddin (2008:108) "sistem sekolah umum harus secara konstan berubah dalam tugas, sasaran, dan tujuan jika ingin memenuhi perubahan kurikulum, struktur organisasi, dan layanan yang diberikan. Kesulitan untuk mewujudkan cita-cita untuk memenuhi perubahan dalam pengembangan sekolah menurut berbagai penelitian yang berkaitan dengan keefektifan manajemen sekolah ditemukan adanya kelemahan utama pada manajemen sekolah terutama pada *team working* yang tidak solid (Sagala,2010). Kecuali masalah *team working* masalah dalam manajemen sekolah adalah "... sebagian pejabat sekolah sulit berkoordinasi dengan para guru dan personal lainnya dalam melaksanakan strategi sekolah." (Sagala,2010:38) Bahkan berdasarkan kajian Bank Dunia tentang persekolahan di Indonesia tahun 1977 ditemukan kepala sekolah di Indonesia diidentifikasi kurang memiliki ketrampilan dalam mengelola sekolah dengan baik. Kelemahan manajemen sekolah yang lainnya berkaitan dengan administrasi sekolah dan kearsipan sekolah.

Akibat dari kelemahan manajemen sekolah, banyak kebijakan sekolah dan keputusan sekolah yang sebenarnya hanya merupakan hasil rekayasa pimpinan dan orang-orang kepercayaan kepala sekolah. Disisi lain kelompok guru yang berada diluar kepala sekolah dan orang-orang kepercayaan kepala sekolah yang sebenarnya memiliki pendapat yang baik tidak diperhatikan, mereka menjadi apatis dan biasanya tidak berpartisipasi terhadap program sekolah. Budaya sekolah tersebut tidak berubah meskipun kepala sekolah sudah diganti dan akhirnya kebijakan yang dilahirkan hanya memancarkan kepuasan

pimpinan dan ambisi orang-orang kepercayaan kepala sekolah. Visi, Misi, dan tujuan sekolah hanya menjadi dokumen saja (Sagala, 2010).

#### **b. Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu**

Dalam penelitian ini perlu dikaji teori administrasi dan manajemen sekolah karena adanya bukti dari penelitian terdahulu tentang lemahnya manajemen sekolah dalam implementasi program sekolah (Syafaruddin, 2008 dan Sagala, 2010). Menurut Sagala sebagian besar kepala sekolah dan wakil-wakil kepala sekolah mengalami kesulitan berkoordinasi dengan para guru dan personal lainnya dalam melaksanakan strategi sekolah. Sebagai akibat kurangnya koordinasi ditemukan administrasi sekolah tidak tersusun dengan baik atau kearsipan yang tidak lengkap.

Berdasarkan kajian Bank Dunia tentang persekolahan di Indonesia 1977 ditemukan bahwa kepala sekolah di Indonesia diidentifikasi kurang memiliki ketrampilan dalam mengelola sekolah. Salah satu buktinya adalah kecilnya peran masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Kepala Sekolah seharusnya memiliki ketrampilan untuk menarik masyarakat yang sudah mapan dalam ekonomi untuk ikut terlibat dalam pengelolaan sekolah. Kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah dalam era desentralisasi sangat mempengaruhi peningkatan mutu dalam sebuah organisasi sekolah.

#### **B. Implementasi Kebijakan Publik**

Tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran adalah tiga komponen dasar yang melekat pada kebijakan publik. Sasaran yang ke tiga yaitu cara mencapai sasaran harus diterjemahkan oleh birokrat menjadi program-

program aksi dan proyek yang didalamnya ada 'cara', dimana terkandung siapa pelaksana atau implementornya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem managemennya, dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur (Wibowo , 1994). Cara dalam komponen dasar yang ke tiga juga merupakan komponen yang berfungsi untuk mewujudkan komponen tujuan dan sasaran khusus. Cara disini bisa disebut implementasi.

Fungsi implementasi menurut Suwitri (2011) adalah membentuk suatu upaya yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai *outcome* atau hasil dari kegiatan pemerintah. Implementasi sebenarnya menyangkut kreativitas dari pelaksana kebijakan untuk merancang dan menemukan alat-alat khusus untuk mencapai tujuan. Hal ini karena kebijakan negara pada umumnya masih berupa pernyataan pernyataan umum tentang tujuan, sasaran, dan berbagai macam sarana yang masih harus dijabarkan kedalam program-program yang lebih rasional yang selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam proyek-proyek.

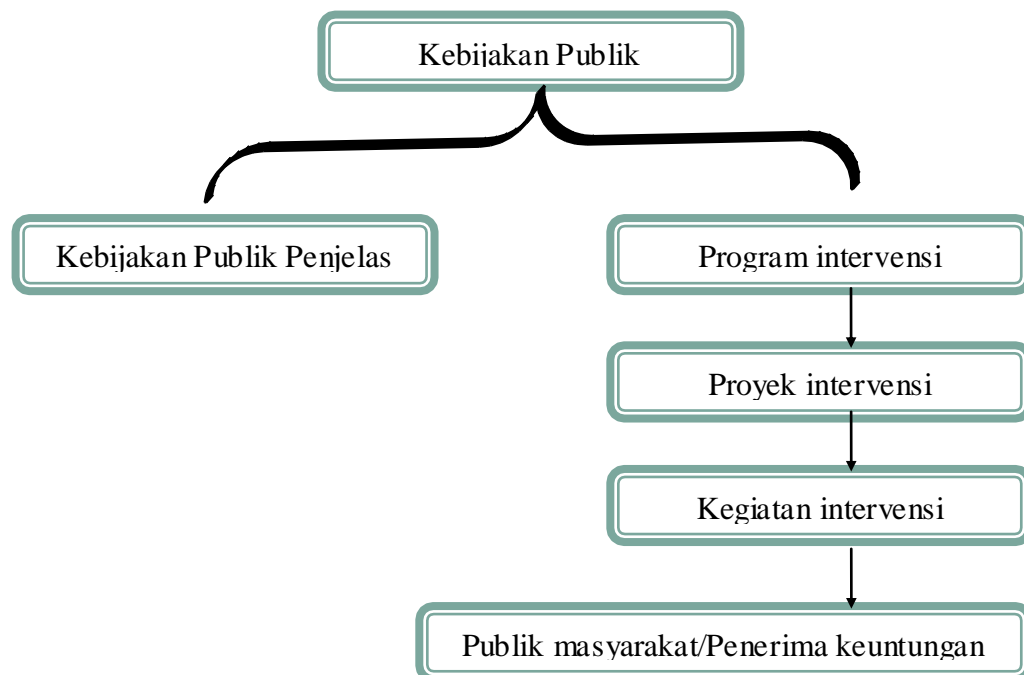
Meter dan Horn dalam wibowo (1994) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Implementasi kebijakan bisa didefinisikan juga sebagai cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Dwijowijoto dalam Syafaruddin, 2002). Berbeda dengan Putt dan Springer dalam Syafaruddin(2002), implementasi kebijakan adalah

serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi yang terwujud dalam praktik organisasi. Kegiatan implementasi menurut Meter dan Horn ini baru dilakukan setelah kebijakan memperoleh pengesahan dari legislatif dan alokasi sumber dayanya juga telah disetujui.

Untuk mengimplementasikan kebijakan ada dua pilihan langkah yang memungkinkan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau dapat melalui kebijakan turunan (derivat) dari kebijakan publik tersebut. (Syafaruddin, 2002) seperti gambar berikut:

Gambar 2.2.

Implementasi kebijakan, Syafaruddin, 2002



Implementasi sendiri menurut Wibowo mulai berlangsung pada tahap penyusunan program. Mazmania dan Sabatier dalam Wibowo (1994) memberikan beberapa langkah untuk menyusun program yaitu:

1. Mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi
2. Menegaskan tujuan yang hendak dicapai
3. Merancang struktur proses implementasi

Grindle dalam Samudra (1994) mengatakan bahwa program harus disusun dengan jelas dan jika tetap masih bersifat umum program harus diterjemahkan secara lebih operasional menjadi proyek. Menurut Grindle kejelasan program diperlukan untuk memeriksa dan mengevaluasi tindakan administrasi yang dilakukan birokrasi guna mentransformasi kebijakan menjadi kegiatan nyata.

Casley dan Kumar dalam Samudra (1994:16) menunjukkan sebuah metode untuk mengimplementasikan kebijakan. Secara rinci mereka membagi kedalam enam langkah sebagai berikut:

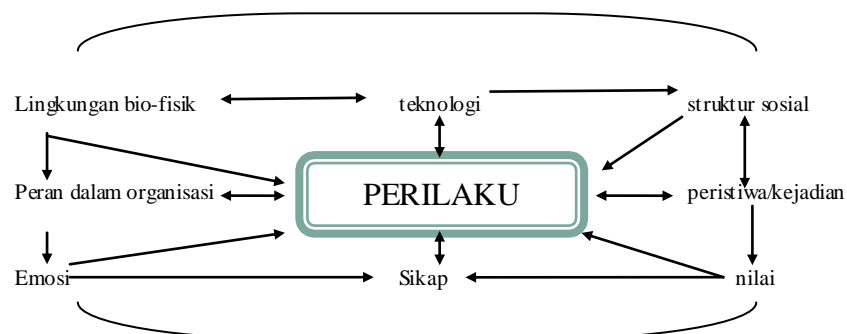
1. **Identifikasi masalah.** Batasilah masalah yang akan dipecahkan atau dikelola dan pisahkan masalah dari gejala yang mendukungnya. Rumuskan sebuah hipotesis.
2. **Tentukan faktor-faktor** yang menjadikan adanya masalah tersebut dengan mengumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif yang memperkuat hipotesis.
3. **Kajilah hambatan** dalam pembuatan keputusan. Analisislah situasi politik dan organisasi yang dahulu mempengaruhi pembuatan kebijakan. Pertimbangkanlah berbagai variable seperti komposisi staf, moral dan kemampuan staf, tekanan politik, kepekaan budaya, kemauan penduduk dan efektivitas manajemen. Hindari diskusi yang tidak realistis.
4. **Kembangkan solusi-solusi** alternatif

5. **Perkirakan solusi yang paling layak.** Tentukan kriteria dengan jelas dan *applicable* untuk menguji kelebihan dan kekurangan setiap solusi alternatif.
6. **Pantau terus umpan-balik** dari tindakan yang telah dilakukan guna menentukan tindakan yang perlu diambil berikutnya.

Implementasi kebijakan akan bisa berjalan sangat efektif tergantung pada perilaku birokrasi pelaksananya yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan seperti digambarkan oleh Widaningrum dalam Wibowo (1994:17).

Gambar 2.3

Determinan Perilaku Administratif, Widaningrum dalam Wibawa  
(1994:17).



Pada kenyataannya ada beberapa model implementasi kebijakan yang tentu saja jangan di aplikasikan secara mentah-mentah sesuai dengan teorinya tetapi dapat disintesis sesuai dengan kebutuhan evaluasi. Tiga model diantaranya adalah model Meter dan Horn, Grindle, dan George C. Edwards III. Dari perbedaan pandangan mereka tentang faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, mereka setuju bahwa faktor sumber daya dan disposisi memegang peranan penting sedangkan faktor yang kedua menurut

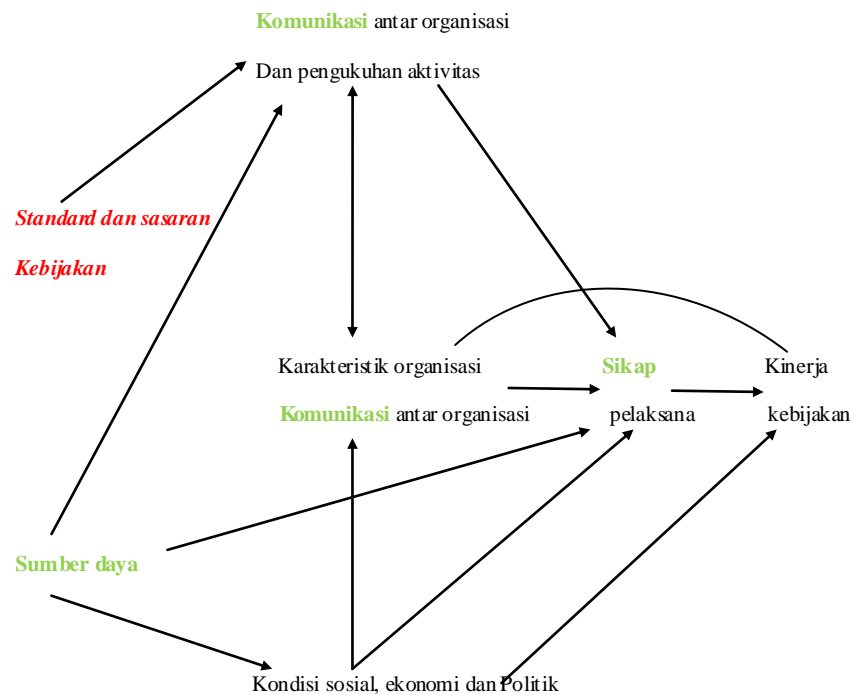
Van Meter dan Van Horn yang didukung oleh George C. Edward III adalah komunikasi. Secara rinci perbedaan pandangan mereka digambarkan sebagai berikut:

### **1. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)**

Meter dan Horn dalam Wibowo (1994) menggambarkan hasil dan kinerja suatu kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Subarsono (2006) menambahkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi adalah hubungan antara standard dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguat aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik serta disposisi implementor seperti terlihat pada gambar 2.4. Kinerja kebijakan menurut model ini pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standard dan sasaran tertentu oleh para pelaksana kebijakan.

Gambar 2.4

## Model Implementasi Kebijakan Menurut Meter dan Horn



**Kriteria standar dan sasaran kebijakan** harus dirumuskan secara spesifik dan konkrit karena dijadikan standar penilaian, misalnya berapa kali sosialisasi program adiwiyata dilaksanakan dalam satu semester, dimana pelaksanaannya, kapan pelaksanaannya, siapa narasumbernya, siapa saja yang akan diundang. Penentuan standar dan sarana sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah, karena sebuah kebijakan kadang-kadang memiliki tujuan yang luas dan kabur. Evaluator harus dapat menangkap tujuan spesifik yang diinginkan oleh suatu kebijakan, mengenali pernyataan pemerintah tentang kebijakannya, mengetahui apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh suatu kebijakan. Apabila standar dan sasaran tidak jelas akan menimbulkan multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi (Wibowo, 1994 dan Subarsono, 2006)



**Sumberdaya** baik yang berupa dana atau *non-human resources* maupun intensif lain tersedia secara memadai sesuai dengan dana minimal untuk mengimplementasikan sebuah kebijaksanaan. Evaluator dalam perspektif ini dapat menguji efisiensi dari implementasi kebijakan yang dikajinya berdasarkan dana minimal yang tersedia. Kecuali sumberdaya non manusia implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya manusia atau *human resource*.

**Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pengukuhan** harus berjalan seiring dengan kejelasan standar dan sasaran untuk menjamin implementasi sebuah kebijakan. Semua implementor kebijakan harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan. Komunikasi antarorganisasi meskipun sebuah proses yang rumit harus dilaksanakan untuk menghindari adanya penyimpangan. Koordinasi antara atasan dan bawahan dilaksanakan agar semua anggota organisasi memiliki idealita sebagaimana yang dikehendaki oleh kebijakan. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pengukuhan berkaitan erat dengan **karakteristik birokrasi pelaksana** yang menurut Ripley dalam Wibawa (1994) sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi pelaksana meliputi karakteristik, norma dan pola hubungan yang potensial maupun aktual.

**Kondisi sosial, ekonomi dan politik** menurut Sharkansky dalam Wibawa (1994) berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Ada enam pertanyaan besar yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik:

- a. Apakah sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi pelaksana cukup memadai untuk mengejar efektifitas yang tinggi?

- b. Bagaimana keadaan sosial-ekonomi dari masyarakat yang akan dipengaruhi kebijakan?
- c. Apa opini publik yang dominan, dan bagaimana pendapat publik terhadap kebijakan?
- d. Apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan?
- e. Adakah kekuatan penentang?
- f. Sejauh mana kelompok kepentingan dan swasta mendukung atau menentang kebijakan?

Kriteria dan sasaran, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pengukuhan, karakteristik birokrasi pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada akhirnya membentuk *sikap pelaksana* terhadap implementasi kebijakan yang pada akhirnya menentukan seberapa tinggi *kinerja kebijakan*. Respons para implementor terhadap fenomena tersebut sangat dipengaruhi oleh kognisi, netralitas, dan objektivitas para implementor. Wujud respon-respon dari para implementor kebijakan akan sangat berpengaruh pada berhasil dan gagalnya implementasi kebijakan. Kecuali itu keberhasilan dan kegagalan implementasi juga sangat dipengaruhi oleh pemahaman para implementor terhadap tujuan kebijakan dan loyalitas implementor terhadap organisasinya.

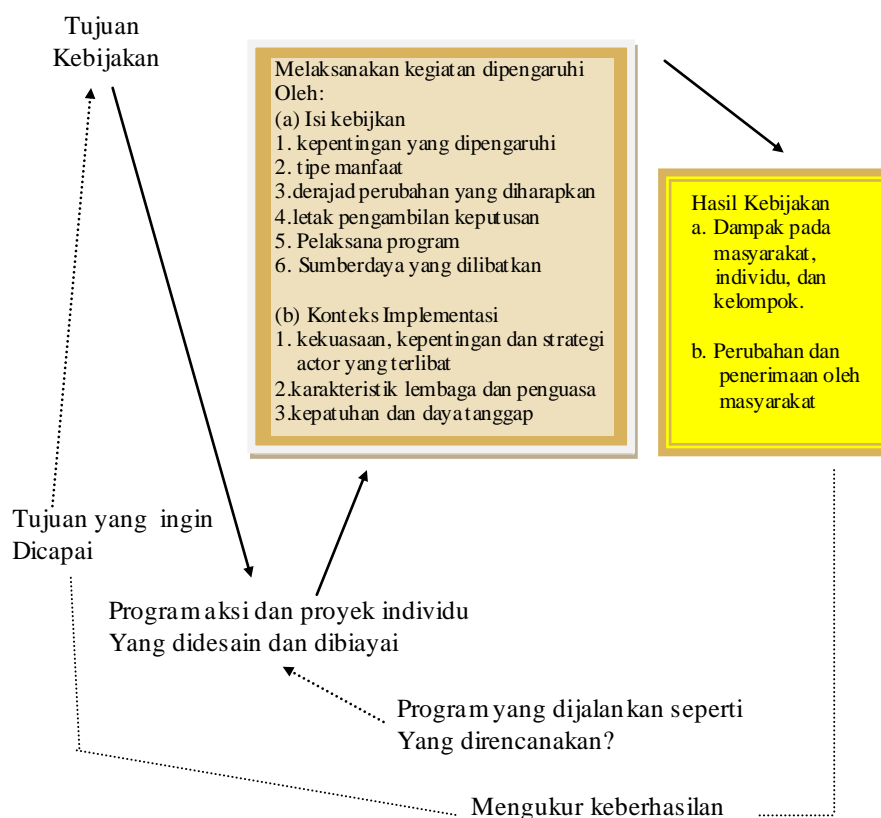
## **2. Model Merilee S. Grindle (1980)**

Berbeda dengan Meter dan Horn keberhasilan implementasi kebijakan menurut Grindle dalam Wibawa (1994) dan Subarsono (2006) dipengaruhi oleh *isi kebijakan* atau *content of policy*, dan *lingkungan implementasi* atau *context of*

*implementation* seperti terlihat pada gambar 2.3, dimana fenomena isi kebijakan mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijaksanaan;(2) jenis manfaat yang akan dihasilkan atau yang akan diterima oleh kelompok sasaran;(3) derajat perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;(4) apakah letak sebuah program atau pengambil keputusan sudah tepat;(5) siapa pelaksana program, apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementornya dengan rinci dan didukung oleh Meter dan Horn (6) ketercukupan sumberdaya yang memadai atau yang dikerahkan untuk mendukung program.

Gambar 2.5

Implementasi kebijakan menurut Grindle dalam Wibawa (1994) dan Subarsono (2006)

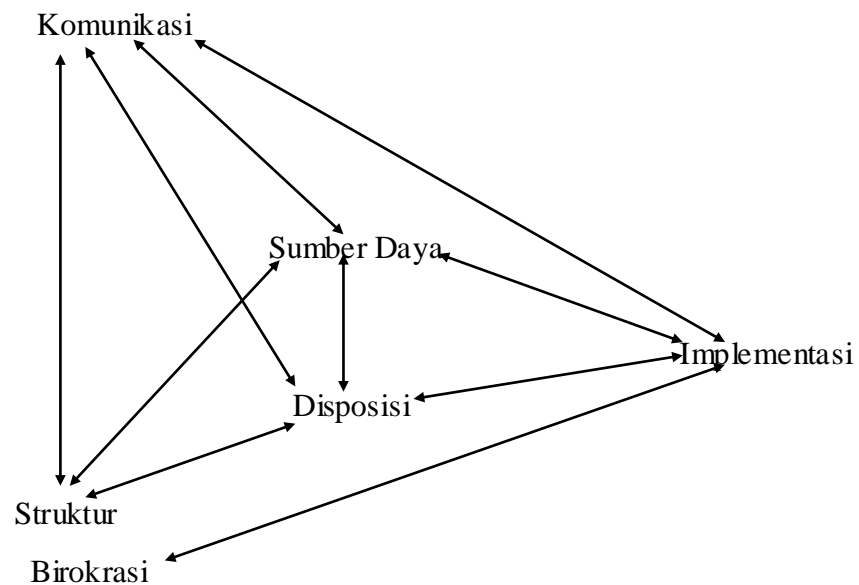


Menurut Grindle kebijakan yang memberikan manfaat yang aktual kepada banyak pelaku lebih mudah diimplementasikan dibandingkan dengan kebijakan yang berkaitan dengan perubahan sikap dan perilaku. Kebijakan-kebijakan yang mempunyai tujuan jangka panjang juga lebih sukar untuk diimplementasikan dibandingkan dengan program yang memiliki tujuan jangka pendek. Konteks kebijakan atau fenomena lingkungan kebijakan mempengaruhi proses implementasi sebagaimana pengaruh kondisi sosial, ekonomi dan politik seperti dalam model Meter dan Horn adalah: (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, (2) karakteristik lembaga dan penguasa, Seperti pendapat Meter dan Horn (3) kepatuhan serta daya tanggap pelaksana atau responsivitas kelompok sasaran.

### **3. Model George C.Edwards III (1980)**

Implementasi kebijakan menurut Edwards III dan didukung oleh Horn dan Meter sangat dipengaruhi fenomena komunikasi dan sumberdaya. Kecuali faktor komunikasi dan sumber daya, Edward memiliki pendapat yang sama dengan Horn, Meter, dan Grindle bahwa disposisi dan struktur birokrasi seperti yang digambarkan (gambar 2.5) juga sangat mempengaruhi kinerja kebijakan.

Gambar 2.6  
Faktor –Faktor Penentu Implementasi Kebijakan menurut Edward III  
dalam Subarsono (2006)



*Komunikasi* mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan oleh implementor kepada kelompok sasaran atau *target group* untuk mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan memunculkan resistensi dari kelompok sasaran. Para implementor harus secara intensif melakukan berbagai cara untuk mensosialisasikan tujuan dan manfaat dari pelaksanaan sebuah kebijakan.

*Sumberdaya* adalah faktor penting untuk efektifitas implementasi kebijakan. Sumberdaya dapat berwujud sumberdaya manusia yang meliputi kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Kekurangan sumberdaya

dalam implementasi kebijakan akan mengakibatkan implementasi kebijakan tidak berjalan efektif meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanyalah sebuah kertas dokumen.

*Disposisi* adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis harus dimiliki oleh implementor apabila dia mau dikatakan seorang disposisi yang baik. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka otomatis dia akan bisa menjalankan kebijakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Hal ini akan berbeda apabila implementor tidak memiliki disposisi yang baik, misalnya karena dia memiliki sikap atau pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka dapat dipastikan proses implementasi kebijakan akan menjadi tidak efektif. Subarsono AG(2006) pembangunan di negara-negara dunia ketiga menunjukkan rendahnya tingkat komitmen dan kejujuran aparat. Salah satu contoh nyata adalah kasus korupsi di Indonesia dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan.

Edward, Van Meter, Van Horn, dan Grindle memiki pendapat yang tidak jauh berbeda tentang pentingnya faktor *Struktur birokrasi* dalam sebuah organisasi. Menurut mereka struktur borokrasi seharusnya memiliki SOP atau *standard operating procedurs* yang merupakan pedoman bagi implementor kebijakan dan salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi. Sebagai implementor kebijakan, struktur otrganisasi seharusnya tidak terlalu panjang karena akan cenderung melemahkan pengawasan dan terjadinya *red-tape*

yaitu sebuah struktur organisasi yang rumit dan kompleks yang menimbulkan kegiatan organisasi tidak fleksibel.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi pendidikan Lingkungan Hidup menuju sekolah Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang peneliti akan mengamati dua fenomena menurut teori Grindle yaitu tentang isi kebijakan yang meliputi derajat perubahan yang diharapkan dengan melaksanakan program Adiwiyata. Sesuai dengan ide dasar dari teori Grindle dalam implementasi bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi dilaksanakan. Derajat keberhasilan implementasi menurut teori Grindle ditentukan oleh Sembilan fenomena, dua diantaranya adalah derajat perubahan yang diinginkan dan pelaksana program. (Tilaar dan Nugroho, 2009)..

Berdasarkan derajat perubahan yang diharapkan muncul sesuai dengan Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, perilaku dan wawasan, serta kepedulian lingkungan hidup peserta didik dan masyarakat. Ke dua adalah meningkatkan mutu sumberdaya manusia sebagai pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam penelitian ini derajat perubahan yang akan diamati adalah perubahan perilaku target kebijakan yaitu para siswawan para implementor dengan adanya pelaksana program Adiwiyata, apakah para guru dapat menjadi teladan dan telah melakukan berbagai cara untuk membuat target kebijakan untuk peduli lingkungan, apakah para siswa

melakukan perubahan seperti yang diharapkan oleh tujuan program tersebut. Kecuali derajat perubahan, peneliti juga akan mengamati fenomena yang berkaitan dengan pelaksana program atau implementor, apakah sekolah telah menyebutkan dengan rinci pelaksana dari program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang, siapa yang bertanggung jawab sampai program tersebut dapat dilaksanakan dengan mudah di lapangan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Peneliti juga akan mengamati tiga fenomena dilapangan menurut teori George C. Edward III yaitu Komunikasi, sumberdaya dan disposisi untuk mendapatkan data dan informasi tentang faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut didukung oleh Meter, Horn, dan Grindle dan situasi dilapangan dimana penelitian dilakukan adalah sebuah organisasi yang bernama sekolah melibatkan komunikasi yang unik antarmanusia dalam aktivitas mereka untuk mencapai tujuan sekolah. Untuk mencapai tujuan sekolah yang telah direncanakan faktor sumberdaya dan disposisi adalah faktor penting lain yang akan mempengaruhi kinerja kebijakan.

### **Komunikasi**

Menurut George C. Edward III yang didukung oleh Meter dan Horn resistensi terhadap implementasi program akan terjadi apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran. Kemampuan berkomunikasi akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja program. Seorang pelaksana program atau implementor yang memiliki kemampuan berkomunikasi dapat menyampaikan



gagasan atau program, dan menyakinkan berbagai pihak akan pentingnya sebuah program, sehingga orang lain terdorong untuk mendukung program tersebut.

Komunikasi adalah media yang harus dikuasai oleh implementor atas substansi kebijakan yang akan disampaikan kepada kelompok sasaran. *Encarta dictionary* mendefinisikan *communication* sebagai *the exchange of information between people, e.g. by means of speaking, writing or using a common system of signs or behavior*. Selanjutnya *communication* juga bisa diartikan *a spoken atau written message, the communication of information, a sense of mutual understanding dan a means of access or communicaton*. Sementara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1999) mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian pesan, pikiran, atau perasaan. Lima Unsur pokok dalam komunikasi menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

- a. Komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan, perasaan, atau pikiran kepada pihak lain.
- b. Komunikan, yaitu orang atau sekelompok orang yang dikirim pesan, pikiran, atau perasaan.
- c. Pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa informasi, instruksi, perasaan, dan sebagainya.
- d. Media, yaitu cara pesan itu disampaikan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, film, dan lainnya.
- e. Efek, yaitu perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan, setelah mendapatkan pesan dari komunikator.

Komunikasi disebut efektif atau mencapai tujuan jika terjadi perubahan perilaku pada komunikan seperti yang diharapkan oleh komunikator. Komunikasi dapat efektif apabila komunikator mengenal pribadi komunikan, selain itu komunikasi harus direncanakan, ada tujuan yang jelas, dan penguasaan terhadap masalah. Implementasi sebuah kebijakan dapat terkomunikasikan dengan baik dari pelaksana atau komunikator ke kelompok sasaran atau komunikan apabila komunikasi berjalan secara efektif. Komunikasi yang efektif dari para pelaksana program ke komunikan atau antara komunikator yang satu dengan lainnya dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam pelaksanaan sebuah kebijakan.

### **Sumberdaya**

Sumberdaya yang dimaksud oleh Edward yang didukung oleh Meter, Horn, dan Grindle dalam implementasi sebuah kebijakan meliputi sumberdaya manusia dan sumberdaya keuangan. Sumberdaya manusia dalam organisasi sekolah terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi (Massie dalam Sagala, 2010). Sekelompok orang tersebut terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang ada kaitannya dengan pengambilan kebijakan berkaitan dengan manajemen sekolah. Sekelompok orang tersebut yang disebut tim administrasi menurut Edward harus memiliki kompetensi untuk bekerja sama dalam mengembangkan kebijakan sekolah menjadi program dan kegiatan, memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan program dengan memanfaatkan semua potensi individu yang tergabung dalam tim tersebut. Komponen sekolah tersebut menurut Sagala (2010) harus memiliki kompetensi sesuai dengan posisi dan peranannya untuk memikul

tanggung jawab dalam mengembangkan dan memajukan setiap sub sistem masing-masing untuk mencapai tujuan sekolah. Jika dikaitkan dengan peranan mereka dalam implementasi kebijakan atau program maka tim tersebut harus memiliki cara-cara yang benar untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan harapan mereka dan tujuan sekolah. Tim administrasi tersebut juga memiliki pendidikan dan pelatihan yang dipakai untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan mereka tentang pelaksanaan kebijakan atau program sekolah.

Sumberdaya finansial dalam implementasi kebijakan menurut Edward yang didukung oleh Meter, Horn, dan Grindle adalah alokasi dana yang digunakan untuk melaksanakan program. Sagala (2010) berpendapat bahwa "aspek kualitas dalam pelayanan belajar dan lulusan merupakan tujuan yang akan dicapai dalam proses belajar mengajar di sekolah." Aspek kualitas tersebut dapat dicapai apabila manajemen sekolah secara cermat memperhitungkan biaya sesuai dengan kualitas yang dipersyaratkan. Dalam organisasi sekolah terutama sekolah negeri sebagian dana membiayai sekolah berasal dari masyarakat

Arikunto (2009) memberikan contoh panduan umum tentang model pertanyaan yang biasanya muncul dalam implementasi program yang mendukung teori implementasi Meter dan Horn, Grindle, dan Edward III yaitu:

- a. Terdiri dari aktivitas atau even apakah program yang sedang berjalan itu?
- b. Metode apa yang digunakan dalam menjalankan program?
- c. Siapa yang sebenarnya menjalankan program?
- d. Siapa yang berpartisipasi dan dalam aktivitas apa? Apa semua pihak yang terlibat memiliki akses yang adil terhadap program?

- e. Sumber daya dan input apakah yang diinvestasikan dalam program?
- f. Seberapa banyak pihak yang terlibat, siapa saja, dan apa perannya?
- g. Apakah sumber daya keuangan dan manusia tersedia dengan cukup?
- h. Seberapa baik mereka melakukannya?

Menurut Abidin (2004) pelaksanaan kebijakan pada umumnya lebih sukar dari sekedar merumuskannya. Munculnya masalah dalam kebijakan karena proses perumusan kebijakan memerlukan pemahaman tentang berbagai aspek yang mengakibatkan tidak semua kebijakan dapat dilaksanakan dengan sempurna. "Pelaksanaan menyangkut kondisi riil yang sering berubah dan sukar diprediksi." Selanjutnya Abidin berpendapat kebijakan lebih sukar dilaksanakan karena dalam proses perumusannya terdapat asumsi, generalisasi, dan simplikasi yang dalam pelaksanaannya sulit untuk dilaksanakan sehingga muncul *implementation gap* atau kesenjangan antara yang dirumuskan dengan yang dapat dilaksanakan. Meskipun dalam batas tertentu kesenjangan tersebut masih dapat ditoleransi atau malah dibiarkan. Meskipun begitu dalam monitoring tetap harus diidentifikasi agar pelaksana dapat memperbaiki kekurangannya.

Tabel 2.1  
 Fenomena fenomena yang mempengaruhi proses implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn	Menurut Grindle	Menurut George C.Edward III	Dalam Penelitian ini menurut Grindle dan Edward
<p>Standar dan sarana kebijakan</p> <p><b>Sumber Daya</b></p> <p><b>Komunikasi</b> antar organisasi dan aktivitas penguahan</p> <p><b>Karakteristik organisasi/komunikasi antar organisasi</b></p> <p>Kondisi sosial, ekonomi dan politik</p> <p><b>Sikap pelaksana</b></p>	<p>Isi kebijakan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kepentingan yang dipengaruhi</li> <li>2. tipe manfaat</li> <li>3. <b>derajad perubahan yang diharapkan</b></li> <li>4. letak pengambilan keputusan</li> <li>5. <b>Pelaksana program</b></li> <li>6. <b>Sumberdaya yang dilibatkan</b></li> </ol> <p>Konteks Implementasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat</li> <li>2. <b>karakteristik lembaga dan penguasa</b></li> <li>3. <b>kepatuhan dan daya tanggap</b></li> </ol>	<p><b>Komunikasi</b></p> <p><b>Sumber daya</b></p> <p><b>Disposisi</b></p> <p>Struktur organisasi</p>	<p><i>Grindle</i></p> <p><i>Isi kebijakan :</i></p> <p><i>Derajad perubahan yang diharapkan</i></p> <p><i>Pelaksana Program</i></p> <p><i>Edward</i></p> <p><i>Komunikasi</i></p> <p><i>Sumber daya</i></p> <p><i>Disposisi</i></p>

## C. Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup Di Indonesia

### 1. Pendidikan Lingkungan Hidup

Bakshi dan Naveh (1978) mengatakan *environmental education is a new philosophy of teaching*. Menurut Bakshi dan Naveh Pendidikan Lingkungan Hidup bisa dirangkum menjadi sebuah gambaran tentang keadaan pengetahuan dan sikap dari siswa untuk menghargai dan mengerti konsep kata *ecosystem*. Pendidikan Lingkungan Hidup selanjutnya jika dilihat dari sudut kognitif berarti pengembangan pengertian tentang *biosphere*, tentang bumi dan isinya yang didiami oleh makhluk hidup. Kekurangan pengetahuan akan konsep ekologi dalam Pendidikan Lingkungan Hidup akan berdampak pada kesalahan perilaku manusia terhadap lingkungan. Dengan kata lain *environmental educational in the sense of teaching the total ecosystem demands that we open up the students to ever new aspects of biosphere. And this "opening up" is, to an essential part, a matter of attitudes*.

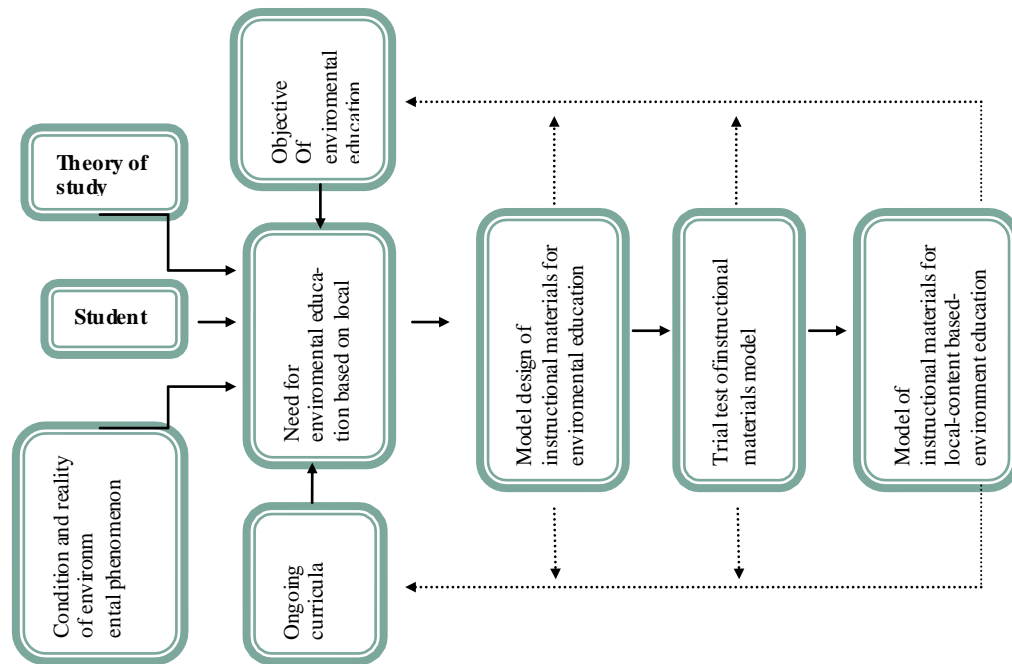
Bakshi dan Naveh selanjutnya mengatakan tujuan dari Pendidikan Lingkungan Hidup *environmental education can lead the way to such understanding by giving people the knowledge of the universe, society and individual, and by helping them in understanding their attitudes towards each other and their bio-physical and social environment*. Sementara Murtalaxono et al(2011)*the aim is to improve people's knowledge, skills, and awareness of environmental values, issues, and problems and to motivate people to participate in efforts to preserve the environment for the present and future generations*.

Materi yang diperlukan oleh siswa agar mencapai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap tentang nilai-nilai, isu, dan masalah-masalah lingkungan harus dikuasai karena materi tersebut memegang posisi penting dalam kurikulum dan seharusnya disiapkan dengan baik sehingga proses Pendidikan Lingkungan Hidup bisa dicapai seperti table 2.1. (Dikmenum, 2010; Hamzah, 2009 dalam Murtilaksono et al, 2011). Materi-materi harus disesuaikan dengan kemampuan, ketertarikan, dan kebutuhan para siswa. Pengembangan materi harus disesuaikan dengan tujuan pemberian materi dan strategi pendidikan lingkungan. Disamping itu pengembangan materi harus mengacu pada kondisi lingkungan, sumber alam, kondisi sosial ekonomi, dan budaya setempat. Materi yang direncanakan harus menekankan pada kompetensi pengetahuan, ketrampilan, isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan dan kebijakan lingkungan, nilai-nilai, dan kemampuan mengevaluasi.

Gambar 2.7

## Materi Dalam PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP

(Dikmenum.2010:HamZah,2009 dalam Murtilaksono et al,2011)



Pendekatan dalam Pendidikan Lingkungan Hidup menurut Judi dan wood(1993) dalam Leksono(2009) dan Murtilaksono et al(2011) *there are two principle types of techniques for incorporating the subject matters of conservation, environment, and mitigation of natural disasters into curricula: the infusion method, which is integrative, and the block method, which is monolithic.*

Metode *infusion* atau model pendekatan integrasi.

Metode *infusion* yang juga dikenal dengan metode *insertion* atau model pendekatan integrasi adalah sebuah metode yang mengintegrasikan isi materi dan proses pemberian materi yang berkaitan dengan konservasi alam dan *mitigation*



bencana alam kedalam kurikulum yang berlaku. Biasanya materi-materi tersebut telah digabungkan dengan materi-materi ilmu alam murni, ilmu sosial, dan sejarah. Meskipun begitu materi-materi tersebut juga bisa dimasukkan kedalam mata pelajaran yang lainnya yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Pendekatan integrasi mengembangkan pokok bahasan tertentu yang selanjutnya diintegrasikan kedalam mata pelajaran dalam bentuk

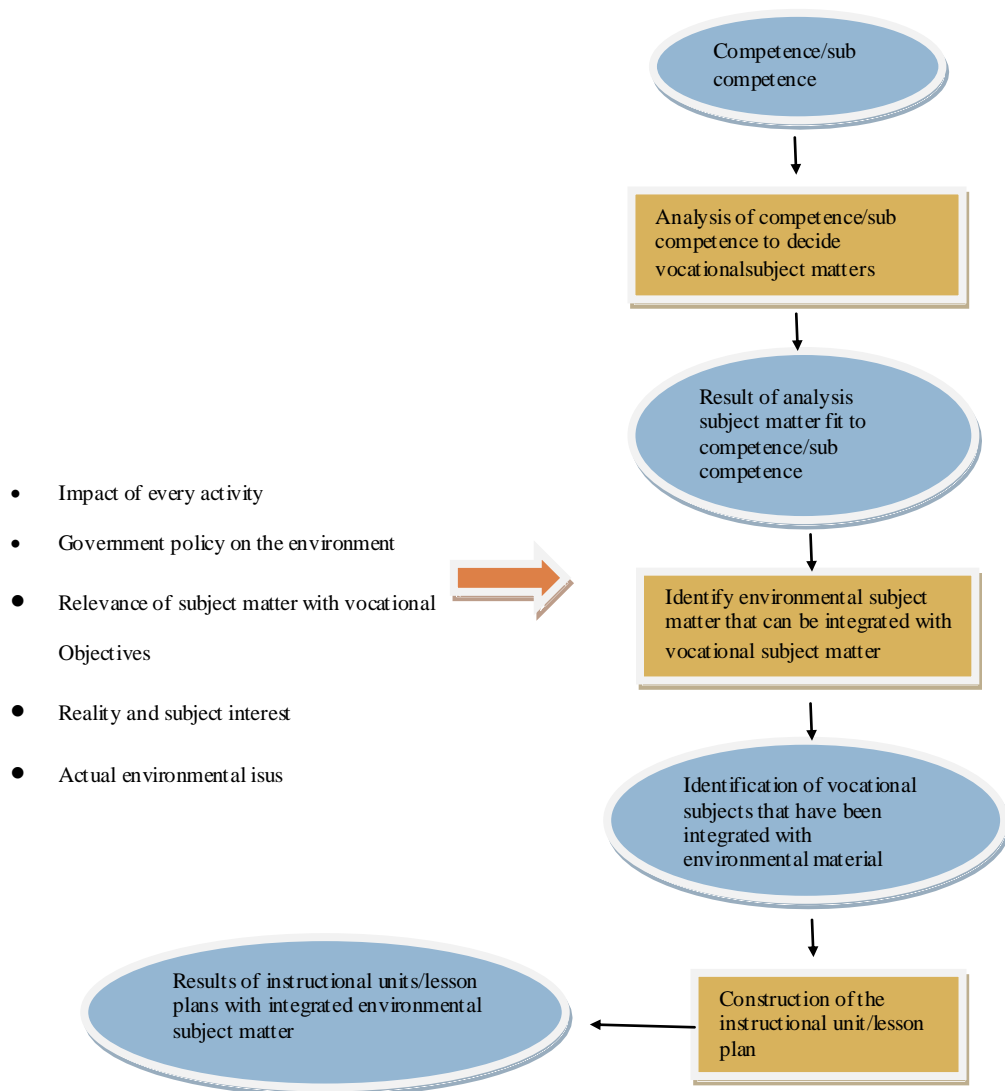
- a. *Broad Outline of a Teaching Program (BOTP)* Pendidikan Lingkungan Hidup dalam dokumen kurikulum,
- b. Sebuah pokok bahasan yang terintegrasi dalam BOPT,
- c. Proses belajar mengajar
- d. Penugasan atau evaluasi *formative* dan *summative*

Pendekatan integrasi sangat sesuai untuk pendidikan formal setingkat sekolah dasar sampai dengan menengah, karena pendekatan integrasi tidak memerlukan waktu ekstra di sekolah sehingga implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup bisa berjalan lebih efisien karena para murid tidak dibebani dengan tambahan waktu. Meskipun begitu pendekatan integrasi menuntun para guru untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang materi-materi lingkungan hidup yang akan diajarkan. *The greater the teachers' involvement in the integration of the materials, the faster knowledge about the environment will be spread to students.* (Murtlaksono et al(2011)). Cahyana dalam Murtlaksono et al(2011) untuk mengimplementasikan pendekatan integrasi, guru harus mempelajari

sebuah matrik tentang materi materi pendidikan managemen lingkungan seperti *flowchart* pada gambar 2.8

Gambar 2.8

### Matrik Materi Materi Pendidikan Lingkungan



Menurut Cahyana, berbagai macam sumber harus dipertimbangkan ketika merumuskan dan menyusun sebuah rencana proses pembelajaran (RPP). Guru harus menganalisa dan mengumpulkan materi-materi yang sesuai untuk dikembangkan menjadi materi pembelajaran termasuk materi-materi yang

dikaitan dengan alam, manusia dan lingkungan sosial. Materi-materi yang berkaitan dengan manajemen lingkungan seperti informasi tentang kebijakan lingkungan, konservasi, manajemen ruang dan polusi, *Environment Impact Assessment* (EIA) atau penugasan yang berdampak pada lingkungan. Sumber-sumber bahan ajar dan pembelajaran mencakup buku, laporan penelitian, jurnal, internet, sumber multimedia dan lingkungan baik alam, sosial, budaya, maupun ekonomi).

Tatemoto (2011) dengan pendidikan lingkungan hidup yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah dapat *provide students with a comprehensive general and specialized education so that they become life-long learners who are able to adapt and continue making contributions in ever-changing society.*

#### **Metode *Block* atau monolitik.**

Dalam metode *block*, mitigasi lingkungan, konservasi, dan bencana alam dipelajari dalam sebuah mata pelajaran yang berdiri sendiri. Metode ini menggunakan pendekatan monolitik yang berasumsi bahwa setiap mata pelajaran memiliki tujuan masing-masing. Pendekatan ini dapat dilaksanakan melalui dua cara yaitu mengembangkan disiplin ilmu misalnya pendidikan mitigasi lingkungan yang setara dengan mata pelajaran yang lainnya yang ada pada kurikulum. Kedua mengembangkan paket pendidikan dalam sebuah mata pelajaran kimia dan fisika.

Materi-materi lingkungan biasanya terintegrasi dalam kurikulum sekolah berupa format muatan lokal. Pendidikan berbasis lingkungan dapat

dikembangkan misalnya melalui program *Adiwiyata* (Muchroddi dan Cahyana dalam Murtilaksono et al, 2011).

Sementara Bakshi (1978) mengatakan bahwa *among the methods which are being most avidly advocated in environmental education are experimental approaches, learning by doing, instead of listening to lectures or reading printed matter alone*. Metode *problem-solving* di laboratorium adalah salah satu pendekatan *learning by doing* yang disarankan oleh Bakshi.

## **2 . Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup Di Indonesia**

Erwin (2009) mengarisbawahi tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari pengaruh adanya asas keterbukaan dan pentingnya peran serta mereka dalam pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan seperti tertuang dalam UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab III, Pasal 5, *”Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”* Pasal ini sekaligus mengisyaratkan kewajiban masyarakat untuk memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya seperti yang tertuang pada Pasal 5 ayat 3, *”hak dan kewajiban untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.”*. Sementara itu pada pasal 10 berbunyi *”Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan penelitian tentang lingkungan hidup.”* Dalam penjelasannya tentang pasal ini dikatakan *“Pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran*

*masyarakat dilaksanakan baik melalui jalur pendidikan formal mulai dari taman kanak-kanak/Sekolah Dasar sampai dengan perguruan tinggi, maupun melalui jalur pendidikan nonformal....”*. Erwin (2009:58-59) menyimpulkan bahwa pendidikan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian tentang lingkungan dengan segala permasalahannya, dan dengan pengetahuan, ketrampilan, sikap, motivasi, dan komitmen untuk bekerja secara individu dan kolektif terhadap pemecahan permasalahan dan mempertahankan kelestarian lingkungan.

Surna T.Djajadiningrat dalam Erwin (2009) mengungkapkan ada tiga hal penting yang perlu diketahui dan dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan dalam proses pendidikan lingkungan agar mencapai tujuan pendidikan lingkungan adalah:

- b. Memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk memperoleh pengertian dasar tentang lingkungan hidup, permasalahannya serta peran dan tanggung jawab manusia dalam upaya melestarikan fungsi-fungsi lingkungan hidup
- c. Membantu individu dan masyarakat mengembangkan ketrampilan yang dibutuhkan dalam pengelolaan, menjaga kelestarian fungsi-fungsi lingkungan dan memecahkan permasalahan lingkungan,
- d. Memupuk kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan hidup dan permasalahannya, melalui penyuluhan terhadap individu atau masyarakat tentang sistem nilai yang sesuai, kepekaan yang kuat atas kepedulian tentang lingkungan dan motivasi untuk secara aktif

berpartisipasi terhadap pelestarian fungsi-fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan

Erwin juga mengatakan bahwa pendidikan lingkungan perlu memenuhi dua kebutuhan masyarakat yang terkait, yaitu:

- a. Mengembangkan sumber daya manusia yang berkemampuan teknis yang dilengkapi dengan pengetahuan yang mendalam, ketrampilan yang dibutuhkan untuk menilai dan mengelola lingkungan; dan
- b. Menumbuhkan sikap dan perilaku pada masyarakat yang peka dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Perkembangan penyelenggaraan pendidikan lingkungan hidup di Indonesia menurut Panduan Adiwiyata yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, 2010 pada jalur formal sudah dimulai sejak tahun 1975 oleh Institut Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta. Pada tahun 1977/1978 rintisan Garis-garis Besar Program Pengajaran Lingkungan Hidup diujicobakan di 15 Sekolah Dasar Jakarta. Pada tahun 1979 di bawah koordinasi kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Meneg Pendidikan Lingkungan Hidup) dibentuk Pusat Studi Lingkungan (PSL) di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, dimana pendidikan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mulai dikembangkan). Sampai tahun 2010, jumlah Pusat Studi Lingkungan yang menjadi Anggota Badan Koordinasi Pusat Studi Lingkungan (BKPSL) telah berkembang menjadi 101 Pusat Studi Lingkungan.

Pendidikan lingkungan hidup pada kurikulum 1984 ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional(Ditjen Dikdasmen,Depdiknas) ditetapkan secara integratif dengan memasukkan masalah-masalah kependudukan dan lingkungan hidup ke dalam semua mata pelajaran pada tingkat menengah umum dan kejuruan. Tahun 1989/1990 hingga 2007, Ditjen Dikjen Dikdasmen,Depdiknas, melalui Proyek Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) melaksanakan program Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup; sedangkan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) mulai dikembangkan pada tahun 2003 di 120 sekolah. Proyek Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup berhasil berkembang menjadi 470 sekolah sampai berakhirnya tahun 2007.

Pada tahun 1996 disepakati kerjasama pertama antara Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, yang diperbaharui pada tahun 2005 dan pada tahun 2010. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan pada tahun 2005, pada tahun 2006 Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan program Pendidikan Lingkungan Hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui program Adiwiyata, dimulai di wilayah pulau Jawa dengan melibatkan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan LSM yang bergerak di bidang pendidikan lingkungan hidup.

Pelaksanaan program Adiwiyata merupakan amanah Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 02 tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata.

Program Adiwiyata menurut panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif. Program ini diharapkan dapat mengajak warga sekolah melaksanakan proses belajar mengajar materi lingkungan hidup dan turut berpartisipasi melestarikan serta menjaga lingkungan hidup di sekolah dan sekitarnya. Kata Adiwiyata berasal dari 2 kata Sanskerta 'Adi' dan 'Wiyata'. **Adi** mempunyai makna besar, agung, baik, ideal atau sempurna. **Wiyata** adalah tempat dimana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma dan etika dalam berkehidupan sosial. Sebagai satu kata **Adiwiyata** bisa memiliki makna tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan.

Program Adiwiyata memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga dikemudian hari warga sekolah dapat turut bertanggungjawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup.

Ada beberapa norma dasar dan kehidupan yang harus dikembangkan dalam program Adiwiyata yang meliputi kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kecuali



itu program Adiwiyata harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip partisipatif dimana komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan tanggungjawab dan peran mereka. Kedua adalah prinsip berkelanjutan dimana seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif.

Dengan melaksanakan kebijakan pendidikan lingkungan hidup melalui program Adiwiyata ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh yaitu:

- a. Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional sekolah dan penggunaan berbagai sumber daya.
- b. Meningkatkan penghematan sumber dana melalui pengurangan konsumsi berbagai sumber daya dan energi.
- c. Meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi semua warga sekolah
- d. Menciptakan kondisi kebersamaan bagi semua warga sekolah.
- e. Meningkatkan upaya menghindari berbagai resiko dampak lingkungan negatif dimasa yang akan datang.
- f. Menjadi tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar.
- g. Mendapat penghargaan Adiwiyata

Untuk mewujudkan program Adiwiyata sekolah harus berusaha memenuhi empat(4) indikator yaitu:

**(1) Pengembangan kebijakan Sekolah Peduli dan berbudaya lingkungan.**

Indikator yang pertama mengandung enam (6) kriteria yang harus terus menerus diusahakan untuk dipenuhi yaitu pengembangan visi misi yang tertuang dalam dokumen KTSP yang mencerminkan adanya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Visi misi tersebut selanjutnya diuraikan dalam rencana program dan kegiatan sekolah dan diketahui/dipahami oleh semua warga sekolah. Kriteria yang kedua adalah adanya kebijakan tentang pengembangan materi pembelajaran pendidikan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen KTSP selain itu sekolah juga melaksanakan kegiatan rutin bertema lingkungan hidup yang mendukung pembelajaran lingkungan hidup sekurang-kurangnya sekali sebulan. Contoh hari-hari peringatan nasional/internasional yang bertema lingkungan hidup adalah:

Tanggal 10 Januari	: Hari Pencanangan Gerakan Satu Juta Pohon
Tanggal 2 Februari	: Hari Lahan Basah
Tanggal 21 Februari	: Hari Sampah
Tanggal 20 Maret	: Hari Kehutanan Sedunia
Tanggal 22 Maret	: Hari air
Tanggal 22 April	: Hari bumi
Tanggal 22 Mei	: Hari keanekaragaman Hayati
Tanggal 5 Juni	: Hari Lingkungan Hidup Sedunia
Tanggal 16 September	: Hari Ozon Sedunia
Tanggal 5 Oktober	: Hari Habitat

Tanggal 5 Nopember : Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional

Kriteria yang ke tiga adalah adanya program atau kebijakan peningkatan kapasitas SDM di bidang lingkungan melalui kegiatan seperti seminar, lokakarya/*workshop*, berjumlah sekurang-kurangnya 50% dari jumlah total tenaga pendidik dan non kependidikan, baik atas inisiatif sekolah maupun pihak lain selama 4 tahun. Peningkatan kapasitas SDM juga bisa dilakukan melalui kegiatan studi banding, training dan pendidikan berjenjang berjumlah sekurang-kurangnya 20% dari jumlah tenaga pendidik dan non kependidikan, baik atas inisiatif sekolah maupun pihak lain selama 4 tahun. Yang ke empat adalah adanya kebijakan sekolah dalam upaya efisiensi penggunaan air, listrik, alat tulis kantor, dan plastik, termasuk petunjuk teknis dan pelaksanaannya yang didukung oleh komite dan melibatkan seluruh warga sekolah, serta adanya kegiatan monitoring secara rutin.

Kriteria yang ke lima adalah adanya kebijakan, peraturan dan/atau tata tertib sekolah yang mengatur kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah, seperti pengelolaan kantin, sampah, toilet, ruang kelas, dan kawasan sekolah yang berwawasan lingkungan melalui ketersediaan ruang terbuka hijau. Disamping itu peraturan atau tata tertib tersebut harus disosialisasikan melalui rapat, upacara, seminar, serta penyebaran *leaflet*, spanduk, dan booklet kepada semua warga sekolah.

Yang terakhir adalah kebijakan pengalokasian dana sekolah secara rutin dalam RAPBS untuk kegiatan pengelolaan dan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup misalnya melalui peningkatan kualitas fisik lingkungan,

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan pengembangan materi ajar, minimal 10 % dari total anggaran. Kebijakan penggalangan dana mandiri untuk pengelolaan lingkungan hidup, misalnya pengumpulan dana dari penjualan kompos hasil karya warga sekolah, penjualan hasil tanaman langka yang dipelihara sekolah, atau penggalangan dana yang berasal dari kerjasama dengan sponsor yang peduli lingkungan.

## **(2). Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan**

Indikator yang kedua harus dikembangkan dengan pengembangan pendidikan lingkungan hidup secara terintegrasi pada mata pelajaran dan monolitik sebagai mata pelajaran tersendiri atau muatan lokal dengan menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, silabus pendidikan lingkungan hidup yang monolitik dan terintegrasi. Hal ini bisa dibuktikan dengan jumlah guru yang mampu pendidikan lingkungan hidup baik monolitik maupun terintegrasi dengan memiliki pendidikan lingkungan hidup sesuai beban materi yang diajarkan. Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan juga ditandai dengan tersedianya bahan ajar/literatur/referensi sekurang-kurangnya 10 judul yang relevan dengan isu lingkungan. Yang tidak kalah pentingnya adalah adanya dokumentasi hasil belajar pendidikan lingkungan hidup setiap peserta didik.

Pengembangan Kurikulum berbasis lingkungan juga harus ditandai dengan teridentifikasinya isu lingkungan lokal yang dapat mendukung penerapan Perda, Renstra, kebijakan lain tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari pemda setempat. Dengan teridentifikasinya isu lokal maka pembelajaran pendidikan lingkungan hidup dapat terlaksana melalui kegiatan

eksplorasi permasalahan lingkungan hidup masyarakat setempat yang tertuang dalam dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Dengan dukungan dan keterlibatan komite sekolah dalam penentuan materi pendidikan lingkungan hidup akan mendukung tersedianya bahan ajar yang kontekstual dengan potensi dan persoalan lingkungan hidup di masyarakat sekitar.

Kriteria yang ke tiga adalah pengembangan metode belajar berbasis lingkungan dan budaya ditandai dengan adanya aksi provokatif yang mendorong terciptanya karakter peduli dan berbudaya lingkungan, dilakukannya pendidikan lingkungan hidup secara proporsional antara teori dan praktik, penerapan secara variatif metode pembelajaran yang berfokus pada siswa sesuai dengan kebutuhan antara lain FGD (*Focus Group Discussion*), penugasan, observasi, *project work*, dll, pemanfaatan nara sumber antara lain tokoh masyarakat, pakar lingkungan hidup, orang tua peserta didik secara terencana, dan terkait dengan mata pelajaran, pemanfaatan nilai kearifan dan budaya lokal dalam pembelajaran lingkungan hidup, pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pengembangan metoda belajar baik biotik maupun abiotik.

Kriteria yang terakhir adalah pengembangan kegiatan kurikuler untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang lingkungan hidup yang ditandai dengan terlaksananya kegiatan perlindungan dan pengelolaan pendidikan lingkungan hidup yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum, dan hasil kegiatannya yang mendukung peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang pendidikan lingkungan hidup sesuai dengan 50% dari jumlah mata pelajaran yang diintegrasikan dan monolitik, mengimplementasikan hasil pembelajaran

pendidikan lingkungan hidup secara terbuka bagi masyarakat melalui pameran, seminar atau *workshop* minimal dua(2) kegiatan per tahun.

### **(3). Pengembangan kegiatan berbasis partisipatif**

Pengembangan kegiatan berbasis partisipatif ditandai dengan menciptakan berbagai kegiatan ekstra kurikuler dalam pembelajaran persoalan lingkungan hidup bagi warga sekolah minimal 1 kegiatan secara rutin yang bertema lingkungan hidup pada setiap program ekstra kurikuler/kokurikuler dan terlaksananya kegiatan lingkungan berbasis partisipatif yang diprakarsai oleh sekolah dengan melibatkan masyarakat sekitar lebih dari 4 kegiatan per tahun.

Kedua adalah dengan mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar dengan telah mengikuti lebih dari empat(4) kegiatan aksi lingkungan hidup yang diprakarsai oleh pihak luar sebagai kegiatan ekstrakurikuler siswa.

Kriteria yang terakhir adalah membangun kegiatan kemitraan atau memprakarsai pengembangan pendidikan lingkungan hidup dengan melakukan lebih dari lima(5) kegiatan kemitraan dan memprakarsai berbagai kegiatan aksi lingkungan hidup dan senantiasa membangun kerjasama jangka panjang dan berkelanjutan untuk pengembangan program lingkungan hidup dengan berbagai pihak.

### **(4). Pengembangan dan atau pengelolaan sarana pendukung sekolah**

Sekolah menyediakan pengembangan fungsi pendukung sekolah yang ada untuk Pendidikan Lingkungan Hidup dengan memanfaatkannya sebagai media

pembelajaran lingkungan hidup, paling tidak ada lima(5) prasarana/sarana sekolah sebagai media pembelajaran lingkungan hidup

Sekolah melakukan peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan di dalam dan di luar kawasan sekolah dengan menyediakan dan memelihara dengan baik semua sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan yang meliputi:

- (a) Pengaturan cahaya ruang
- (b) Ventilasi udara secara alami
- (c) Pemeliharaan dan pengaturan pohon peneduh atau penghijau, pemanfaatan sumur resapan dan atau biopori serta pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah.

Sekolah juga terus berupaya untuk melakukan penghematan terhadap efisiensi penggunaan air, listrik, alat tulis kantor, plastik dan bahan lainnya, serta dapat dibuktikan keberhasilannya selama 3 tahun. Kriteria yang lain adalah adanya peningkatan kualitas pelayanan makanan sehat ditandai dengan adanya:

- (a) Lokasi kantin yang memenuhi syarat kebersihan dan ramah lingkungan
- (b) Pemeriksaan berkala minimal 1 kali setahun terhadap kualitas makanan kantin
- (c) Pemantauan terhadap jenis, kemasan makan dan kebersihan kantin secara rutin minimal 1 kali sebulan
- (d) Penggunaan kemasan ramah lingkungan
- (e) Pemberian penyuluhan secara rutin kepada pedagang minimal 1 kali setahun
- (f) Guru penanggungjawab kantin atau pengelola/penyedia makanan sehat.

Sekolah mengembangkan pengelolaan sampah dan bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas pengelolaan sampah dengan cara:

- (a) Praktek pemilahan sampah
- (b) Pengelolaan sampah yang memenuhi syarat dengan menyediakan tempat sampah terpisah minimal dua jenis organik dan anorganik, melakukan kegiatan 3R dan pengomposan, menyediakan jumlah tenaga kebersihan yang mencukupi, adanya mekanisme keterlibatan peserta didik dan guru
- (c) Perubahan perilaku warga sekolah dalam memperlakukan sampah.

#### **D. Kerangka Pikir**

Abidin (2004) mengemukakan bahwa tidak semua kebijakan berhasil dilaksanakan secara sempurna. Pada umumnya pelaksanaan kebijakan lebih sukar karena pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan kondisi riil yang sering berubah dan sukar diperkirakan. Kondisi riil tersebut berbeda dengan asumsi-asumsi generalisasi dan simplifikasi ketika kebijakan tersebut dalam proses dirumuskan. Sebagai akibatnya pada proses pelaksanaan muncul *implementation gap* atau kesenjangan, perbedaan antara apa yang dirumuskan dalam kebijakan dan apa yang dapat dilaksanakan.

Menurut Grindle untuk melaksanakan sebuah kebijakan tidak akan lepas dari fenomena isi kebijakan dua diantaranya adalah derajat perubahan dan pelaksana program. Apa yang diharapkan dengan melaksanakan program tersebut dan siapa yang akan melaksanakan program tersebut sangat mempengaruhi kinerja implementasi.

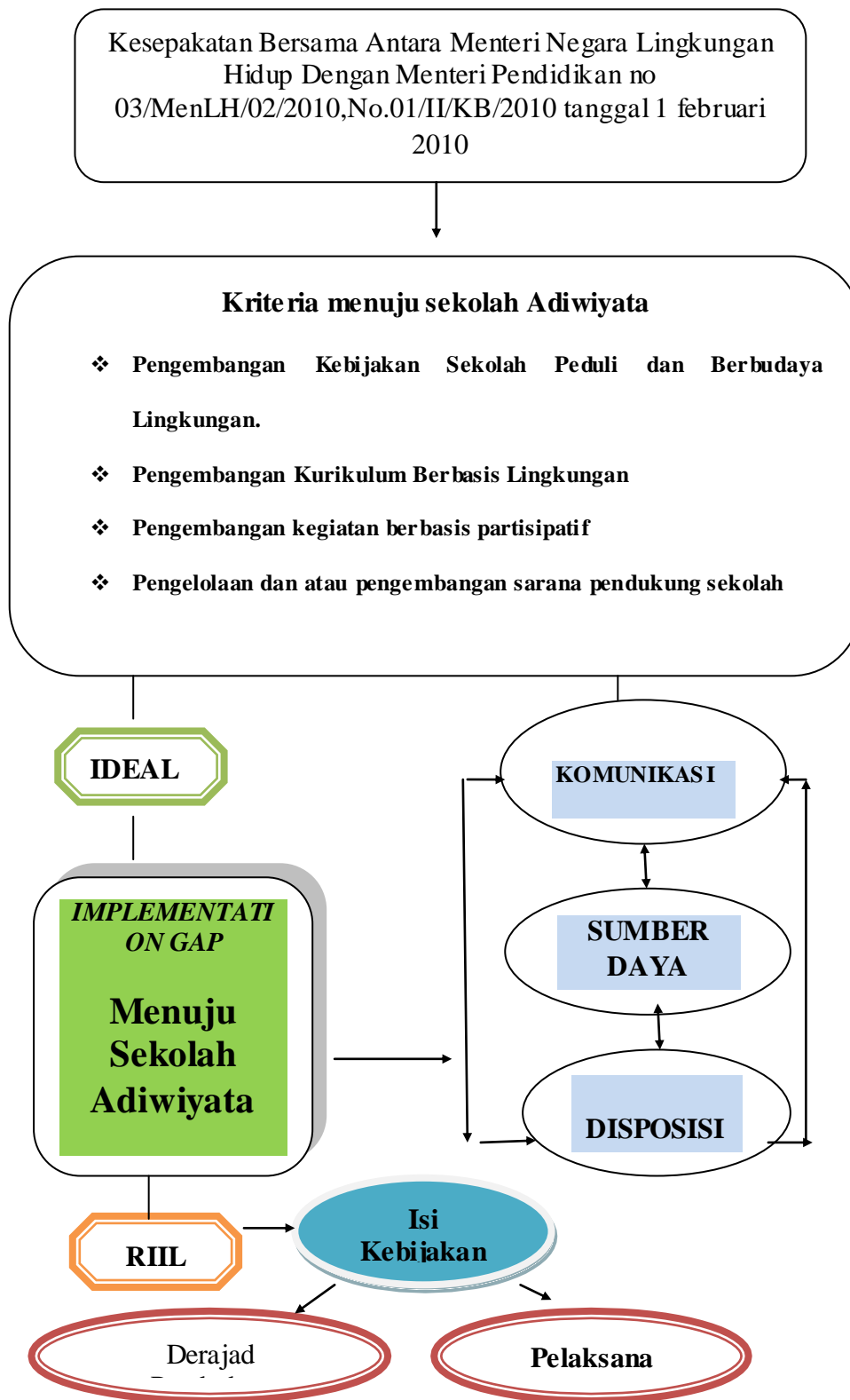


Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi menurut Edwards III yang didukung oleh tokoh lain seperti Grindle, Van Meter, dan Van Horn *implementation gap* tersebut sangat dipengaruhi oleh kegiatan dan cara-cara yang dipakai dalam berkomunikasi diantara para pelaksana program. Cara para komunikator berkomunikasi akan sangat berpengaruh pada kemampuan sumber daya manusia yang menjadi target pelaksanaan kebijakan. Komunikasi disebut efektif apabila informasi yang dikomunikasikan mencapai tujuan seperti yang diharapkan oleh komunikator. Kompetensi para pelaksana tentang isi kebijakan akan meningkat secara otomatis apabila komunikasi berjalan efektif. Komunikasi yang efektif diantara para pelaksana yang menguasai isi kebijakan akan berpengaruh pada sikap atau disposisi para pelaksana program yang akhirnya akan berpengaruh pada kinerja kebijakan.

Oleh sebab itu peneliti akan menggunakan data dan informasi yang diperoleh kemudian menganalisis keterkaitan data dan informasi tersebut dengan fenomena fenomena derajat perubahan, pelaksana program, komunikasi, sumber daya dan disposisi tentang implementasi kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang untuk memenuhi kriteria menjadi Sekolah Menengah Atas Adiwiyata.

Alur berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.9  
Alur Berfikir Penelitian



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Perspektif Pendekatan Penelitian**

Perspektif pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan asumsi bahwa peneliti lebih mudah berhadapan dengan kenyataan, dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar aspek lebih akrab dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Penelitian kualitatif menurut Strauss Anselm dan Corbin Juliet(2003) adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperbolehkan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya meskipun begitu sebagian datanya dapat dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif. Metode kualitatif menurut beberapa pengalaman beberapa peneliti dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikitpun belum diketahui, disamping itu pendekatan kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan Nasution S (1992:5) mengatakan “penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berintegrasi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia kerjanya. Peneliti berusaha melakukan pengamatan berbagai gejala yang terjadi secara wajar di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang, sehingga menuntun peneliti sendiri sebagai instrument penelitian (*key instrument*) yang dilengkapi dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kemudian peneliti mengumpulkan data mengenai implementasi kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang untuk menuju Sekolah Adiwiyata yaitu dengan memperhatikan fenomena fenomena yang muncul menurut Grindle yaitu isi kebijakan yang berkaitan dengan derajat perubahan yang diinginkan dan pelaksana program. Untuk mendapatkan tentang faktor-faktor yang menghambat implementasi, peneliti akan menggunakan teori George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya dan disposisi.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, fokus utama dalam penelitian ini adalah tentang implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang menuju Sekolah Adiwiyata dengan mengamati beberapa fenomena atau fakta sosial yang terjadi yang sekaligus menjadi pedoman wawancara di lapangan yang meliputi derajat perubahan yang diinginkan , pelaksana program. Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam implemetasi akan diamati fenomena komunikasi, sumber daya dan disposisi.

### **C. Lokasi Penelitian.**

Penentuan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk lebih mempersempit ruang lingkup dalam pembahasan sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang ingin dikaji sesuai permasalahannya. Pemilihan lokasi dalam penelitian kualitatif sangat penting dan dilakukan dengan sistem purposif yakni pemilihan lokasi yang didasarkan atas tujuan tertentu. Disebabkan kebijakan Pendidikan

Lingkungan Hidup memiliki prinsip dasar partisipatif dimana komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran masing-masing dan yang ke dua adalah berkelanjutan yaitu seluruh kegiatan harus dilaksanakan secara terencana dan terus menerus, maka akan difokuskan pada implementasi kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang melalui program Adiwiyata berdasarkan data tahun 2011 sampai dengan Maret tahun 2012.

#### **D. Fenomena Pengamatan**

Penelitian dengan berlandaskan fenomenologi dalam Hidayat (2011) melihat objek penelitian dalam satu konteks yang alami atau natural, artinya seorang peneliti kualitatif melihat suatu peristiwa tidak sepotong sepotong atau parsial, lepas dari konteks sosialnya. Fenomena yang sama dalam situasi yang berbeda, akan memiliki makna yang berbeda pula. Fenomena yang akan diamati terkait dengan implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup melalui program Adiwiyata dalam penelitian ini adalah menurut Grindle dengan menitikberatkan pada fenomena isi kebijakan yaitu derajat perubahan yang terjadi dengan melaksanakan kebijakan pendidikan lingkungan hidup menuju sekolah Adiwiyata atau sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Sesuai dengan ide dasar dari teori Grindle dalam implementasi bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi dilaksanakan. Derajat keberhasilan implementasi menurut teori Grindle ditentukan oleh Sembilan fenomena, dua diantaranya adalah derajat perubahan yang diinginkan dan pelaksana program. (Tilaar dan Nugroho, 2009)..

Berdasarkan derajat perubahan yang diharapkan muncul sesuai dengan Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, perilaku dan wawasan, serta kepedulian lingkungan hidup peserta didik dan masyarakat. Ke dua adalah meningkatkan mutu sumberdaya manusia sebagai pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam penelitian ini derajat perubahan yang akan diamati adalah perubahan perilaku target kebijakan yaitu para siswawan para implementor dengan adanya pelaksana program Adiwiyata, apakah para guru dapat menjadi teladan dan telah melakukan berbagai cara untuk membuat target kebijakan untuk peduli lingkungan, apakah para siswa melakukan perubahan seperti yang diharapkan oleh tujuan program tersebut. Kecuali derajat perubahan, peneliti juga akan mengamati fenomena yang berkaitan dengan pelaksana program atau implementor, apakah sekolah telah menyebutkan dengan rinci pelaksana dari program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang, siapa yang bertanggung jawab sampai program tersebut dapat dilaksanakan dengan mudah di lapangan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Data dan informasi yang terkait dengan faktor-faktor yang menghambat implementasi program Adiwiyata akan digunakan teori Edward III. George C. Edward III berpendapat ada empat(4) fenomena yang berkaitan dengan implementasi program yaitu *komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi*. Namun, dalam penelitian ini fenomena yang akan diamati adalah *komunikasi*,

*sumber daya, dan disposisi*. Alasan peneliti hanya mengamati ketiga fenomena ini karena ke tiga fenomena tersebut didukung oleh tokoh lain seperti Grindle, Van Meter, dan Van Horn. Selain itu peneliti mengharapkan adanya penelitian serupa dengan menggunakan fenomena yang berbeda untuk dapat mempertajam hasil penelitian sebelumnya.

Hal ini bisa diartikan bahwa untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi sebuah kebijakan tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta dilapangan yang berkaitan derajat perubahan yang terjadi dan siapa pelaksana program Adiwiyata yang diuraikan sebagai berikut:

### **1. Derajat perubahan yang diinginkan**

- a. Bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan , nilai, sikap, perilaku dan wawasan, serta kepedulian lingkungan hidup peserta didik dan masyarakat.
- b. Bagaimana meningkatkan mutu sumberdaya manusia sebagai pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

### **2. Pelaksana Program**

- a. Bagaimana pelaksana kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk menuju sekolah Adiwiyata.
- b. Bagaimana dengan penanggung jawab program tersebut.

Sedangkan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menghambat implementasi fenomena-fenomena komunikasi, sumber daya, dan disposisi yang dirinci sebagai berikut:

## **1. Komunikasi.**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui bagaimana membangun komunikasi dengan kelompok sasaran, . Apabila dikaitkan dengan implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup dalam fenomena yang berkaitan dengan komponen komunikasi akan dicari sumber-sumber data baik secara lisan melalui wawancara maupun tertulis melalui dokumentasi dan pengamatan tentang pertukaran informasi baik melalui cara lisan, tertulis, atau dalam tanda-tanda bahasa tubuh yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sekitar implementasi program menurut Arikunto Suharsimi:

- a. Bagaimana implementor mengkomunikasikan jenis aktivitas atau kegiatan yang sedang dijalankan di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang untuk menuju sekolah Adiwiyata
- b. Bagaimana implementor mengkomunikasikan metode yang sedang digunakan dalam menjalankan program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang
- c. Bagaimana para implementor saling berkomunikasi untuk berkoordinasi dengan birokrasi dan kelompok sasaran dalam menjalankan program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang

## **2. Sumber daya**

Menurut Edward III yang didukung oleh Grindle, Van Meter, dan Van Horn, sumber daya yang berkaitan dengan implementasi program meliputi



kompetensi implementor dan sumber daya financial. Ketercukupan minimal jumlah implementor, kemampuan implementor dan dana atau intensif lain sesuai dengan dana minimal untuk menjalankan program. Dalam penelitian ini pengamatan fenomena akan difokuskan pada:

- a. Bagaimana kompetensi para implementor dalam program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang
- b. Bagaimana ketercukupan implementor, kedudukan implementor dan peran implementor dalam pelaksanaan program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang.
- c. Bagaimana ketercukupan sumber daya keuangan dalam menjalankan program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang.

### **3. Disposisi**

Disposisi menurut Edward III adalah watak dan karakter yang dimiliki oleh para pelaku program yang berkaitan dengan komitmen, kejujuran dan demokratis. Sehingga dalam penelitian ini fenomena yang akan diamati adalah data atau informasi yang berkaitan dengan pertanyaan bagaimana sikap, watak, karakteristik para implementor berkaitan dengan, *komitmen*, *kejujuran*, *keterbukaan* ketika menjalankan program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang

### **E. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti lewat wawancara lisan atau tertulis dengan informan atau *person*

yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian. Selain wawancara lisan maupun tertulis data primer akan dikumpulkan melalui observasi lingkungan atau *place*.

Data sekunder yang berupa *paper* akan dikumpulkan bukan hanya dibatasi pada kertas saja tetapi segala bentuk symbol seperti denah, tabel, dari hasil dokumentasi kurikulum, Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah, Rencana Kegiatan Sekolah, notulen rapat, *leaflet*, foto, kliping, dan laporan kegiatan yang mendukung pelaksanaan atau implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup 2011 sampai dengan Maret tahun 2012.

#### **F. Pemilihan Informan**

Informan penelitian adalah *person* atau orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian yaitu kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 11 di Kota Semarang dan para wakil mereka, ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang, outsourcing Benresik, kepala tata usaha untuk menemukan informasi yang mendalam tentang implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *Purposive* dan prosesnya secara *snow ball* (Hidayat, 2011)

#### **G. Instrumen Penelitian**

Instrumen menurut Arikunto (2009) adalah sesuatu yang dapat berfungsi untuk membantu mengumpulkan data. Instrumen kunci yang akan dipakai peneliti dalam pengumpulan data digambarkan seperti pada tabel 3.1.

1. Teknik wawancara mendalam

Teknik ini dipakai untuk mendapatkan data primer tentang fenomena-fenomena yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Meskipun begitu teknik ini akan digunakan untuk menguji kebenaran dan kemantapan suatu data yang diperoleh dengan cara observasi dokumen dan lingkungan. Untuk mendapatkan data melalui wawancara mendalam ini, secara objektif peneliti akan membangun hubungan yang alami dengan mempermudah pertanyaan dan menghubungkan pertanyaan sesuai dengan pokok-pokok yang akan ditanyakan terutama tentang bagaimana implementasi program Adiwiyata dengan menimbulkan kesan bahwa informasi dari informan tersebut sangat penting

2. Teknik observasi

Metode observasi dalam pengumpulan data dengan cara menyediakan waktu yang cukup untuk melihat objek dari berbagai segi dan jurusan secara berulang-ulang. Kemudian melihat objek yang sejenis dan lebih banyak dari segi yang berbeda-beda dengan menggunakan alat bantu handycam, kamera foto, dan MP3, kemudian memperhatikan data-data yang relevan, menggolong-golongkan sesuai dengan fenomena tentang implementasi program Adiwiyata.

3. Teknik dokumentasi

Dokumen menurut Arikunto (2009) adalah catatan mengenai berbagai kejadian di masa lalu baik berupa media cetak maupun tulis seperti surat, catatan harian berupa notulen, dan dokumen lainnya. Tahap pertama

peneliti akan melakukan *exploring* yaitu menggali dan mencari data yang berhubungan dengan implementasi kebijakan program Adiwiyata. Setelah dokumen terkumpul, ditelaah dengan cepat sesuai dengan fenomena yang berkaitan dengan kegiatan implementasi atau *scanning*. Tahap ke tiga *organizing* yaitu menyusun data-data tersebut berdasarkan urutan kepentingan penelitian. Tahap yang ke empat adalah *interpreting* yaitu menafsirkan dokumen yang telah dikelompokkan sesuai dengan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kegiatan implementasi dengan cara menterjemahkan dokumen dokumen secara utuh ke dalam makna yang sebenarnya ingin diungkapkan oleh data tersebut. Tahap yang terakhir adalah *analysing*. Peneliti akan mencocokkan, membandingkan, dan mengkaitkan fakta-fakta yang ada dengan teori-teori yang berkaitan dengan kegiatan implementasi kebijakan pendidikan lingkungan hidup melalui program Adiwiyata. Ringkasan alat-alat pengumpulan data digambarkan pada tabel 3.1

Tabel 3.1  
Pedoman Instrumen Penelitian

<b>Fenomena</b>	<b>Komponen</b>	<b>Sumber data</b>	<b>Metode</b>	<b>Instrumen</b>
Isi Kebijakan	Derajat Perubahan	<i>Person Paper Place</i>	Wawancara, dokumentasi, pengamatan	Panduan wawancara, tape recorder, handycam, note
	Pelaksana Program	<i>Person Paper</i>	Wawancara Dokumentasi	Panduan wawancara, tape recorder, note
Komunikasi	Lisan	<i>Person</i>	Wawancara	Panduan wawancara, tape recorder, note,

	Tertulis	<i>Paper</i>	Dokumentasi	Panduan dokumentasi
	Signs	<i>Place</i>	Pengamatan	Panduan Pengamatan, Handycam
Sumber daya	Implementor Financial	<i>Person</i>	wawancara	Panduan wawancara, tape recorder, note,
		<i>Paper</i>	dokumentasi	Panduan dokumentasi
Disposisi	Komitmen Kejujuran Demokratis	<i>Person</i>	wawancara	Panduan wawancara
		<i>Paper</i>	dokumentasi	Panduan dokumentasi

## H. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan pendekatan kualitatif yang dipergunakan untuk mendapatkan data atau informasi yang bersifat alami yang berkaitan dengan implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang menuju Sekolah Adiwiyata maka peneliti akan memposisikan informan sebagai teman atau subjek dan bukan semata-mata menjadi objek penelitian. Peneliti akan mengembangkan rasa ingin tahu dengan teknik 'probing' atau penelusuran kembali dengan selalu menciptakan 'rapport' atau hubungan yang harmonis dengan informan (Hidayat, 2011). Peneliti juga akan menggunakan deskriptif analisis data kualitatif Burhan Bungin dalam Arikunto (2009) Menurut mereka analisis kualitatif terdiri dari alur yang terjadi bersamaan yaitu reduksi data, penyajian (*display*) data, dan menafsirkan data, menyimpulkan data dan verifikasi, meningkatkan keabsahan hasil baru kemudian menarasikan hasil data.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Said Zainal,2004,*Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah,Jakarta.
- Arikunto Suharsimi,Cepi Safruddin Abdul Jabar,2009,*Evaluasi Program Pendidikan*,Bumi Aksara,Jakarta.
- Bakshi Trilochan S dan Naveh Zeh,1978,*Environmental Education Principal Method And Application*,Plenum Press, New York and London.
- Brown Lester R,1999,Masa Depan Bumi, Yayasan Obor Indonesia,Jakarta.
- Cahaya,A,2009,*Pendidikan Lingkungan Hidup*, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Dan Tenaga Pendidikan Pertanian, Cianjur.
- Erwin Muhamad,2009,*Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*,PT Refika Aditama,Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum,1999,*Panduan Manajemen Sekolah*,Dikmenum, Jakarta.
- Gandhi HW,Teguh Wangsa, 2011,*Filsafat Pendidikan Mazhab Mazhab Filsafat Pendidikan*,Ar-Russ Media,Jakarta.
- Hartono,2006,*Bagaimana Menulis Tesis*,Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang,Malang.
- Indratno, A Ferry T,2007,*Kurikulum Yang Mencerdaskan*,Kompas,Jakarta.
- Kementerian lingkungan hidup,2010,*Panduan Adiwiyata*,Asdep Urusan Penguatan Inisiatif Masyarakat,Jakarta.
- Kesuma Dharma,2011,*Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktek di Sekolah*,PT Remaja Rosdakarya,Bandung.
- Kukuh Widiyanto,2011,*Partisipasi siswa SMA Negeri 11 Semarang pada tahun pelajaran 2010-2011dalam pelaksanaan program sekolah hijau atau Green schools*, skripsi, Semarang.
- Microsoft , 2007, *Microsoft Encarta Reference Library*, Microsoft,America.
- MLE,2010,*MLA Handbook for Writer of Research Paper*,The Modern Language Association of America,New York.

- Mudyahardjo Redjo,2010,*Filsafat Ilmu Pendidikan*,PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyana E,2011,*Managemen Berbasis Sekolah*,PT Remaja Rosdakarya,Bandung.
- Nasution S, 1992, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*,Tarsito, Bandung
- Nugroho Riant,2008,*Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*,Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pemerintah Kota Semarang,2010,*Profil Kota Semarang*,Kantor Informasi Dan Komunikasi Kota Semarang, Semarang.
- Puskurbuk,2011,*Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter*,Jakarta.
- Raka,Gede et.al,2011,*Pendidikan Karakter Di Sekolah*,PT Elex Media Komputindo,Jakarta.
- Riduan, 2010, *Managemen Pendidikan*,Alfabeta, Bandung
- Sagala Syaiful,2010,*Managemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*,Penerbit Alfabeta,Bandung.
- Strauss,A dan Corbin,J, 2003,*Dasar Dasar Penelitian Kualitatif*.Terjemahan Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Subarsono AG,2006,*Analisis Kebijakan Publik*,Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suryani M, 2009,*Pendidikan Lingkungan Sebagai Dasar Kearifan Sikap dan Perilaku Bagi Kelangsungan Kehidupan Menuju PembangunaBerkelanjutan*, Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan, Jakarta.
- Suwitri Sri,2011,*Konsep Dasar Kebijakan Publik*,Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Syafaruddin,2008,*Efektivitas Kebijakan Pendidikan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Tilaar H.A.R dan Nugroho Riant,2009,*Kebijakan Pendidikan*,Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wibawa Samodra et.al,1994, *Evaluasi kebijakan publik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.



Wibowo Eddi,2004, *Kebijakan Publik Dan Budaya*, YPAPI, Yogyakarta.

Murtalaksono et.al, "*Secondary and Higher Education for Development of in Indonesia*",*Journal of Development in Sustainable Agricultural*, 2011,6:35-44

Tatemono Yoshikazu,"*Environmental Education at Sakado Senior High School, University of Tsukuba*", *Journal of Development in Sustainable Agricultural*,2011,6:136-139

Hidayat Zainal, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif fenomenologi;Sebuah Pokok Pikiran*,FISIP Universitas Diponegoro,2011, 3-4

The Jakarta Post,RI Needs "More" Disaster Funds,Sabtu 23 Juli 2011.

Suroto Petrus,*Percikan Hati,Renungan Harian dan Pendalaman Iman* volume 10,nomor 7 Maret 2012.

<http://www.republika.co.id/berita/104656/indonesia-dilanda-6632-bencana-selama-1997-2009>.

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara .....	1
2. Denah Ruang Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang.....	3
3. Ijin Penelitian .....	4

## Lampiran 1

**PEDOMAN WAWANCARA****PENELITIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN  
LINGKUNGAN HIDUP SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11  
SEMARANG MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA**

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan rencana wawancara secara garis besar yang kemudian akan dikembangkan secara mendalam saat wawancara dilakukan dengan informan untuk mendapatkan data yang lengkap, actual, dan akurat.

**1. Derajat perubahan yang diinginkan**

- c. Bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan , nilai, sikap, perilaku dan wawasan, serta kepedulian lingkungan hidup peserta didik dan masyarakat.
- d. Bagaimana meningkatkan mutu sumberdaya manusia sebagai pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup

**2. Pelaksana Program**

- c. Bagaimana pelaksana kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk menuju sekolah Adiwiyata
- d. Bagaimana dengan penanggung jawab program tersebut

### **3. Komunikasi**

- a. Bagaimana implementor mengkomunikasikan jenis aktivitas atau kegiatan yang sedang dijalankan di SMA N 11 Semarang untuk menuju sekolah Adiwiyata
- b. Bagaimana implementor mengkomunikasikan tentang metode yang sedang digunakan dalam menjalankan program Adiwiyata di SMA N 11 Semarang
- c. Bagaimana para implementor saling berkomunikasi untuk berkoordinasi dengan birokrasi dan kelompok sasaran dalam menjalankan program Adiwiyata di SMA N 11 Semarang

### **4. Sumber daya**

#### **1) . Kompetensi Implementor**

- d. Bagaimana kompetensi para implementor dan input yang diinvestasikan dalam program Adiwiyata di SMA N 11 Semarang
- e. Bagaimana kecukupan implementor, kedudukan implementor dan peran implementor dalam pelaksanaan program Adiwiyata di SMA N 11 Semarang.

#### **2) Sumber daya finansial**

- f. Bagaimana kecukupan sumber daya keuangan dalam menjalankan program Adiwiyata di SMA N 11 Semarang.

## 5. Disposisi

- g. Bagaimana sikap, watak, karakteristik para implementor berkaitan dengan , *komitmen, kejujuran, keterbukaan* ketika menjalankan program Adiwiyata di SMA N 11 Semarang

